Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia[1]

Oleh
Azis Budi Setiawan[2]

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya untuk melakukan implementasi sistem keuangan Islami empat dekade terakhir berjalan begitu gencar. Meskipun terdapat sejumlah kesulitan, gerakan Islamisasi perbankan berjalan dengan baik. Kemajuan yang dicapai selama seperempat abad terakhir ini menunjukkan hasil yang menggembirakan (Chapra, 2002: 22). Tantangan utama bank syariah saat ini diantaranya adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan dari para *stakeholder*. Sudah menjadi rahasia umum bahwa, hanya bank-bank yang sanggup membangkitkan kepercayaan *stakeholder* mereka saja yang akan bisa tumbuh, berkembang dan mengukir sejarah baru. Bank tersebut akan mampu memobilisasi simpanan, menarik investasi, menyalurkan pembiayaan, menanamkan investasi, sekaligus memperluas kesempatan kerja, membantu pemerintah membiayai defisit anggaran untuk pembangunan, dan mengakselerasi pembangunan ekonomi dengan baik. Hal ini terjadi karena semua institusi keuangan harus merespon realitas bahwa penyedia dana (*shareholder* dan *deposan*) serta *stakeholder* yang lain memiliki harapan, dan mereka tidak akan menanamkan dana atau berkontribusi dengan baik apabila ekspektasi mereka tidak diproyeksikan terpenuhi.

Ekspektasi *stakeholder* terhadap bank syariah tentu berbeda dengan bank konvensional. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwasannya bank syariah dikembangkan sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam sendiri dalam hal ini tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat, yang merupakan implementasi peran bank syariah selaku pelaksana fungsi sosial.

Berdasarkan latar belakang diatas penting untuk dilakukan penelitian tentang kesehatan finansial dan kinerja sosial dari bank syariah, karena dengan pencapaian keduanya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas deposan, *shareholder*, dan *stakeholder* lainnya terhadap bank syariah. Hal ini diharapkan dapat mengevaluasi kinerja bank syariah secara komprehensif baik pencapaian kinerja bisnis dan kinerja sosialnya selama lima tahun terakhir.

---

[1] Bagian dari tesis penulis. Disampaikan pada Seminar Ilmiah Kerjasama Magister Bisnis Keuangan Islam Univ. Paramadina, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Aula Nurcholis Madjid, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2009.

[2] Peserta Program Magister Bisnis Keuangan Islam Univ. Paramadina dan Staf Pengajar SEBI *School of Islamic Economics* (STEI SEBI).

1.2. Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya. Fungsi sosial tersebut yang paling nampak diantaranya diwujudkan melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, sadaqah, hibah dan waqaf (ZISW). Selain itu bank syariah juga mengelurakan zakat dari keuntungan operasinya serta memberikan pembiayaan kebajikan (*qardh*). Melalui fungsi sosial ini diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama mereka yang sangat membutuhkan.

Dengan demikian, karena bank syariah memiliki fungsi bisnis dan fungsi sosial maka dalam mengevaluasi kinerjanya juga harus dilakukan secara komprehensif. Bank syariah harus dievaluasi pencapaian kinerja bisnis sekaligus kinerja sosialnya. Namun sayangnya kinerja sosial bank syariah di Indonesia selama ini belum ada yang meneliti lebih jauh. Penelitian selama ini lebih cenderung untuk mengevaluasi kinerja bisnisnya saja (lihat penelitian Rosyadi, 2007; Prawira, 2007; Arsil, 2007; Mahfudz, 2006; Rindawati; 2007). Sehingga dengan demikian pencapaian kinerja sosial bank syariah di Indonesia belum diketahui. Padahal kinerja bisnis dan kinerja sosial merupakan bagian integral yang harus dievaluasi, menginggat bank syariah didirikan dan dikembangkan untuk memenuhi dua fungsi tersebut. Pemenuhan kedua fungsi inilah yang juga menjadi ciri unik bank syariah, dibandingkan dengan bank konvensional yang hanya berorientasi bisnis atau "*profit maximizer*" semata.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesehatan finansial dari Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Bagaimana kinerja sosial dari Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih fokus maka penelitian yang dilakukan dibatasi untuk beberapa hal berikut:

1. Objek penelitian adalah dua bank umum syariah yang ada di Indonesia, yaitu: Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Pada akhir tahun 2007, *market share* kedua bank umum syariah tersebut telah mencapai ± 65 persen dilihat dari sisi aset perbankan syariah secara keseluruhan. Sedangkan *share* pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing mencapai ± 67 persen dan ± 70 persen dari keseluruhan industri perbankan syariah (Laporan Keuangan BMI & BSM, 2007; LPPS BI, 2007). Dengan demikian hal ini relatif dapat merepresentasi kinerja perbankan syariah di Indonesia secara umum.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan periode 2003-2007 yang telah diaudit dan dipublikasikan.
3. Untuk menilai kesehatan finansial BMI dan BSM penulis hanya berfokus untuk meneliti tiga variabel penting dalam komponen kesehatan finansial yaitu: Kualitas Aset (*Asset Quality*); Rentabilitas (*Earning*); dan likuiditas (*Liquidity*).
4. Untuk menilai kinerja sosial BMI dan BSM penulis berfokus untuk mengevaluasi aspek Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE), Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM), Kontribusi Untuk *Stakeholder* (KUS), Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR) serta Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE).

1.4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan studi kasus, yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu secara rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh (Husein Umar, 2003: 55-56). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena. Teorisasi dan hipotesis dalam penelitian jenis ini kurang diperlukan (Hariwijaya & Jaelani, 2005: 39). Dalam hal ini, penulis akan melakukan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan periode 2003-2007 yang telah dipublikasikan. Laporan Keuangan Tahunan yang digunakan adalah laporoan keuangan yang telah diaudit, mencakup: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Investasi Terikat, Laporan Perubahan Modal, Arus Kas, Laporan Dana Zakat Infaq dan Sadaqah serta Catatan Atas Laporan Keuangan yang sangat detail. Dari rincian Catatan Atas Laporan Keuangan hasil audit banyak didapatkan data yang sangat rinci untuk menghitung beberapa rasio yang membutuhkan data yang spesifik.

II. LANDASAN TEORITIS

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Pondasi filosofis sistem perbankan syariah dalam pandangan Iqbal (1997: 3) berakar pada konsep interaksi faktor-faktor produksi dan perilaku ekonomi yang Islami. Menurutnya, sistem Islam memberikan penekanan yang sama pada dimensi etis, moral, sosial, dan spiritual dalam upaya meningkatkan keadilan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Chapra (2000: 2), perbankan syariah juga memiliki tugas penting untuk terlibat dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi yang meluas, meralisasikan keadilan sosial-ekonomi, distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata.

Senada dengan Chapra dan Zamir Iqbal, Lewis dan Algaoud (2007: 123) menyimpulkan bahwa tujuan utama perbankan dan keuangan Islam dari perspektif Islam mencakup: (1) penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip Islam; (2) distribusi pendapatan dan kekayaan

yang wajar; dan (3) mencapai kemajuan pembangunan ekonomi. Dengan demikian tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersil untuk pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat.

Selain itu pada perbankan syariah struktur tata kelolanya akan melibatkan lebih banyak pihak karena adanya karakteristik khusus dari perbankan syariah. Dalam sistem organisasi bank syariah, masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda dan suatu sistem tata keola yang baik mempersyaratkan adanya pengaturan yang jelas tentang batasan hak, kewenangan dan kewajiban dari setiap unsur tersebut untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dan agar tidak terjadi dominasi kepentingan salah satu pihak dengan mengabaikan kepentingan pihak lain. Beragamnya *stakeholder* bank syariah dapat dilihat dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1
Stakeholder* Bank Syariah dalam Prespektif *Agency Theory

Agents { Management of Islamic banks

Principals

Stakeholders	Based on:
Government (Law and regulations for Islamic banks)	Law and regulations
Supervisors	
Employees	Explicit and implicit contract
Shareholders	
Depositors	
Investment Account Holders (restricted and unrestricted)	
Current Account Holders	
The community (*ummah*)	Ethics and moral obligations
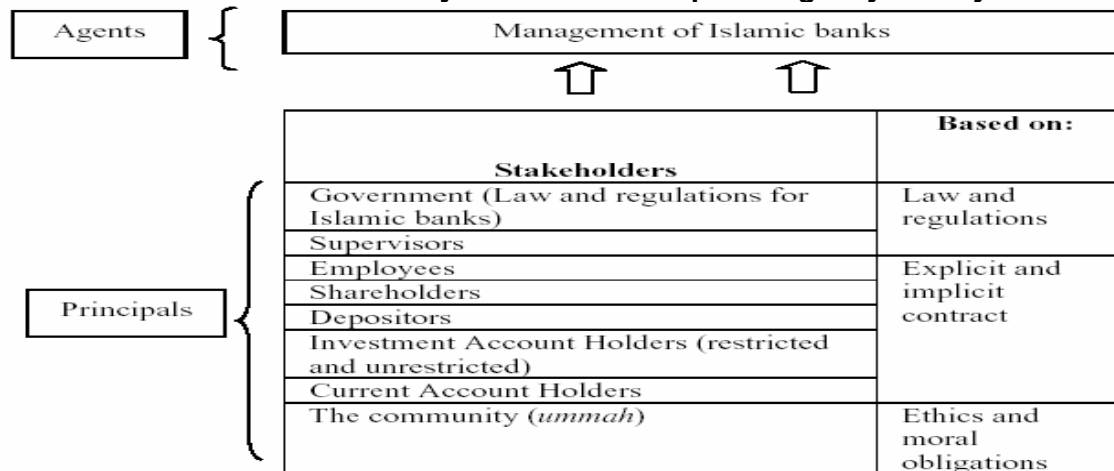
Sumber: Ilyas, 2004; Fatima & Pramono, 2007

Selain banyaknya kepentingan yang harus dijaga, bank syariah juga harus menjaga citra Islam. Karena menurut Chapra & Ahmad (2002), *stakeholders* terpenting dari bank syariah adalah Islam itu sendiri. Karena bank syariah memakai label Islami secara otomatis memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga citra Islam. Apabila terjadi masalah misalnya penyelewengan dan kegagalan usaha dari suatu bank syariah, secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak kepada citra Islam. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan tuntutan struktur yang khas dalam pengelolaan bank syariah, yaitu bagaimana kepentingan citra Islam dapat dilindungi.

Beragamnya *stakeholder* bank syariah merupakan karakter unik dari bank syariah tersebut. Hal ini menuntut pengaturan yang jelas tentang batasan hak, kewenangan dan kewajiban dari setiap unsur tersebut untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan serta menjamin keadilan untuk masing-masing pihak. Dalam sistem nilai Islam, perlindungan hak-hak semua *stakeholder* secara adil sangat ditekankan. Konsep Islam memberikan kerangka sistem nilai yang memberikan prioritas maksimum pada realisasi keadilan dan kewajaran. Dengan demikian diharapkan seluruh kepentingan *stakeholder* akan terakomodasi secara adil dan wajar. Adapun kepentingan-kepentingan dan harapan-harapan dari seluruh *stakeholder* bank syariah dapat diidentikasi sebagai berikut.

Tabel 2.1
Kepentingan dan Harapan *Stakeholder* Bank Syariah

Stakeholder	Kepentingan dan Harapan
Manajemen	o Profitabilitas, likuiditas, dan kualitas aset yang baik. o Gaji, Tunjangan dan Fasilitas yang baik.
Pegawai	o Gaji dan Tunjangan yang baik. o Fasilitas Peningkatan Kompetensi SDM. o Penghargaan atas inovasi dan kreatifitas.
Pemegang Saham	o Profitabilitas, likuiditas, dan kualitas aset yang baik. o Dividen yang tinggi dan peningkatan nilai harga saham.
Pemegang Investasi *Mudharabah*	o Bagi hasil (*profit sharing*) yang tinggi. o Investasi yang aman.
Pemegang Giro *Wadiah*	o Fasilitas jasa bank yang baik. o Bonus yang memadai.
Pemerintah	o Kontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. o Kontribusi pembayaran pajak.
Masyarakat (*Ummat*)	o Kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk zakat perusahaan, pembiayaan qard dan peran edukasi publik. o Kontribusi dalam pembangunan ekonomi: mendorong pertumbuhan dunia usaha dan realisasi investasi. o Kontribusi dalam redistribusi pembangunan ekonomi.

Sumber: Dikembangkan dari Chapra & Ahmad (2002), Ilyas (2004), Fatima & Pramono (2007).

Kepentingan dan harapan dari seluruh *stakeholder* bank syariah tentu harus diupayakan untuk dipenuhi oleh pengelola bank syariah dalam kerangka keadilan dan kewajaran. Seluruh kepentingan tersebut harus diakomodasi dengan menghindari terjadinya konflik kepentingan serta agar tidak terjadi dominasi kepentingan salah satu pihak dengan mengabaikan kepentingan pihak lain. Dari seluruh kepentingan dan harapan *stakeholder* terhadap bank syariah diatas dapat diakomodasi oleh sistem penilaian kinerja bisnis (*business performance*) dan kinerja sosial (*social performance*) yang dikembangkan secara komprehensif. Kinerja bisnis bagi bank syariah diantaranya bisa diwakili dalam beberapa variabel dalam pengukuran kesehatan finansial bank syariah. Sedangkan untuk melihat kinerja sosial perlu dikembangkan sebuah model penilaian yang dikembangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada, yang diharapkan bisa mencover kepentingan dan harapan dari manajemen, pegawai, pemegang saham, pemegang rekening investasi *mudharabah*, pemegang rekening *wadiah*, pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, karena bank syariah memiliki fungsi bisnis dan fungsi sosial maka dalam mengevaluasi kinerjanya juga harus dilakukan secara komprehensif. Dalam Islam keberadaan evaluasi kinerja sangat dianjurkan. Konsep *muhasabah* merupakan representasi yang mendasar dari evaluasi kinerja, yang bisa diterapkan untuk individu atau perusahaan (Hameed, et. al, 2004). Hal ini kemudian menjadi landasan filosofis penting mengapa perlu dilakukan evaluasi kinerja bagi bank syariah. Bank syariah harus dievaluasi pencapaian kinerja bisnis sekaligus kinerja sosialnya.

Kinerja bisnis bank syariah secara umum dapat dilihat dari kesehatan finansialnya. Kesehatan bank syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola, masyarakat pengguna jasa bank syariah dan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas pengawasan. Menurut Riyadi (2006: 169) tingkat kesehatan bank adalah

penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia (BI). Selanjutnya untuk menilai kesehatan bank syariah BI mengeluarkan ketentuan baru yang berbeda dengan ketentuan untuk bank konvensional. Metode penilaian baru tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Tingkat Kesehatan Bank Syariah dalam PBI tersebut dijelaskan sebagai hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank atau UUS melalui: (1) Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*); dan (2) Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen (*management*). Dalam PBI tersebut juga dijelaskan bahwa faktor finansial merupakan salah satu faktor pembentuk Tingkat Kesehatan Bank Syariah. Faktor finansial tersebut terdiri dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sesitivitas terhadap risiko pasar. Komponen penilaian faktor finansial inilah yang dapat dilihat sebagai kesehatan finansial dari bank syariah.

Dalam penelitian ini hanya berfokus untuk meneliti tiga variabel penting dalam komponen kesehatan finansial tersebut yaitu: kualitas aset (*asset quality*); rentabilitas (*earning*); dan likuiditas (*liquidity*). Penilaian terhadap faktor kualitas aset secara keseluruhan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen: kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti; serta kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. Dalam penelitian ini, dengan mempertimbangkan konsideran ketersediaan data, untuk menilai kualitas aset akan difokuskan terutama pada penilaian kualitas aktiva produktif (KAP) dan perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah atau yang lebih dikenal dengan *non-performing financing* (NPF).

Selanjutnya, penilaian terhadap faktor rentabilitas secara keseluruhan mencakup penilaian terhadap: kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi; serta diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Untuk penelitian ini, dalam pembahasan aspek rentabilitas difokuskan pada: kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba dengan menilai rasio *net operating margin* (NIM), *Return on assets* (ROA) dan *Return on equity* (ROE); tingkat efisiensi melalui Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO); diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income* (DP); serta diversifikasi penanaman dana yaitu dengan menilai Komposisi penempatan dana pada surat berharga/pasar keuangan (IdFR).

Dalam menilai faktor likuiditas secara keseluruhan penilaian mencakup: kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch*, dan konsentrasi sumber pendanaan; dan kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan. Dalam penelitian ini, untuk aspek likuiditas difokuskan pada penilaian kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek (*Short Term Mismatch*/STM); potensi *maturity mismatch* (*Short Term Mismatch*

Plus/STMP); dan potensi akses kepada sumber pendanaan dengan menilai Rasio Antar Bank Pasiva (RABP).

Evaluasi kinerja sosial bagi bank syariah diperlukan untuk mengakomodasi kekhasan operasionalnya. Dengan melihat sejarah dan idealisme awal pendirian bank syariah dapat disimpulkan bahwa bank syariah juga memiliki fungsi sosial (Suharto, dkk., 2001: 24; Antonio, 2001: 201-202). Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, fungsi sosial dari bank syariah ini juga dipertegas. Pada pasal 4 dinyatakan, bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga memiliki produk pembiayaan *qard* (dana kebajikan). Produk ini juga dapat dikategorikan sebagai wujud tanggung jawab sosial bank syariah yang tidak dapat diperoleh dari bank konvensional. Dengan demikian jelas sekali bahwa fungsi sosial dari bank syariah sangat strategis dalam merealisasikan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui beragam instrumen ekonomi Islam tersebut.

Kalau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kinerja bank syariah di Indonesia lebih banyak berfokus pada kinerja keuangan atau bisnis maka beberapa pakar perbankan syariah internasional telah mencoba melihat kinerja bank syariah lebih komprehensif. Penelitian Samad dan Hasan (2000) misalnya bisa merepresentasi upaya awal tersebut. Dalam penelitian ini Samad dan Hasan selain menggunakan beberapa rasio keuangan yang umum digunakan seperti rasio *profitability, liquidity, risk and solvency* juga mengevaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi dan masyarakat muslim. Untuk mengevaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi digunakan analisis: (1) *Long term loan ratio* (LTA); (2) *Government Bond Investment Ratio* (GBD); dan *Mudaraba-Musharaka Ratio* (MM/L).

Upaya lebih serius untuk merumuskan sekaligus menggunakan alat evaluasi kinerja yang khas bagi perbankan syariah dilakukan oleh Hameed, et. al. (2004). Dalam penelitian tersebut mereka merumuskan apa yang disebut *"Islamicity Performance Index"*. Dalam metode pengukuran kinerja bagi bank syariah tersebut rasio keuangan yang digunakan antara lain: (1) *Profit Sharing Ratio* (*Mudaraba+Musyarakah/Total Financing*); (2) *Zakat Performance Ratio* (*Zakat/Net Asset*); (3) *Equitable Distribution Ratio*; (4) *Directors-Employees Welfare Ratio* (*Average directors' remuneration/Average employees' welfare*); (5) *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment Ratio*; dan (6) *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio*. Rumusan indeks kinerja bank syariah baru ini diaplikasikan mereka untuk mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic Bank (BIB) secara deskriptif. Dalam indeks tersebut sebagian besarnya dapat disebut sebagai pengukur kinerja sosial sebagaimana alat evaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi yang digunakan oleh Samad dan Hasan diatas.

Untuk melihat kinerja sosial bank syariah penulis mengembangkan pendekatan yang pernah dibuat oleh Samad dan Hasan (2000), Hameed, et., al. (2004), serta menggabungkan dengan rasio-rasio yang berdimensi sosial dan telah ada dalam penilain kesehatan bank syariah yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (2007). Adapun komponen yang dikembangkan penulis dan akan diteliti dalam kinerja sosial bank syariah

ini mencakup: Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE), Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM), Kontribusi Untuk *Stakeholder* (KUS), Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR) serta Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE).

Dalam penelitian ini, Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE) bank syariah dinilai dari aspek Intensitas Pembiayaan Profit Sharing (MMR), Intensitas Fungsi Agency (AR), Kontribusi Pembangunan Jangka Panjang (KPJP), dan Pendalaman Fungsi Agency (PFA). Sedangkan Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM) bank syariah dinilai dari aspek Rasio Pembiayaan *Qardh* (QR), Rasio Kinerja Zakat (ZR), Rasio Pelaksanaan Fungsi Sosial (RFS), dan Rasio Pelaksanaan Fungsi Edukasi (CSR).

Berikutnya, dengan mempertimbankan ketersediaan data, Kontribusi Untuk *Stakeholder* (KUS) bank syariah dinilai dari aspek Kontribusi terhadap Kesejahteraan *Sohibul Maal* (KSM), Kesejahteraan *Mudharib* (KM), Kesejahteraan Investor (KI), Kesejahteraan Pemegang *Wadiah* (KPW), dan Kontribusi Pajak untuk Pemerintah (KPP). Untuk aspek Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR) bank syariah dinilai dari aspek alokasi anggaran untuk Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (P4) dan Riset dan Pengembangan (R&D). Sedangkan Kontribusi dalam Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE) dari bank syariah akan dinilai dari aspek Pemerataan Distribusi Aset Nasional (PDAN), Pemerataan Distribusi Investasi Nasional (PDIN), dan Kontribusi Pendapatan dari Luar Jawa (KPLJ).

Tabel 2.2 Komponen dan Formula Kesehatan Finansial Bank Syariah

Faktor Dinilai	Komponen	Formula/Rasio	Keterangan/Tujuan
Kualitas Aset	Kualitas aktiva produktif (rasio utama)	$KAP = \left(1 - \frac{APYD(DPK, KL, D, M)}{Aktiva\ Produktif}\right)$	Mengukur kualitas aktiva produktif bank syariah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baik kualitas aktiva produktif bank syariah.
	Besarnya Pembiayaan *non performing* (rasio penunjang)	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}}$	Mengukur tingkat permasalahan Pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk.
Rentabilitas	*Net operating margin* (NOM) (rasio utama)	$NOM = \frac{(PO - DBH) - BO}{Rata2\ AP}$	Mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba.
	Return on assets (ROA) (rasio penunjang)	$ROA = \frac{Laba\ sebelum\ pajak}{Rata2\ TA}$	Mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.
	Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO) (rasio penunjang)	$REO = \frac{BO}{PO}$	Mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah.
	Diversifikasi pendapatan (rasio penunjang)	$DP = \frac{Pendapatan\ Berbasis\ Fee}{Pendapatan\ dari\ penyaluran\ dana}$	Mengukur kemampuan bank syariah dalam menghasilkan pendapatan dari jasa berbasis *fee*. Semakin tinggi pendapatan berbasis fee mengindikasikan semakin berkurang ketergantungan bank terhadap pendapatan dari penyaluran dana.
	Return on equity (ROE) (rasio pengamatan)	$ROE = \frac{Laba\ bersih\ stl\ Pajak}{Rata - rata\ Modal\ Disetor}$	Mengukur kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar.

	Komposisi penempatan dana pada surat berharga/pasar keuangan (rasio pengamatan)	$IdFR = \frac{SWBI + SB + Penyertaan}{AP}$	Mengukur besarnya penempatan dana bank syariah pada surat berharga dan pasar keuangan. Semakin tinggi rasio ini mengindikasikan fungsi intermediasi bank syariah belum optimal.
Likuiditas	Besarnya Aset Jangka Pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek (rasio utama)	$STM = \frac{Akt\ Jgk\ Pendek}{Kew\ Jgk\ Pendek}$	Mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.
	Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan *Secondary Reserve* dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (rasio penunjang)	$STMP = \frac{Akt\ Jgk\ Pdk + Kas + Secnd\ Reserve}{Kew\ Jgk\ Pdk}$	Mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva jangka pendek, kas, dan *secondary reserve*.
	Ketergantungan pada dana antar bank (rasio pengamatan)	$RABP = \frac{Antar\ Bank\ Pasiva}{Total\ Kewajiban}$	Mengukur tingkat ketergantungan bank terhadap dana antar bank.

Sumber: Bank Indonesia, 2007

Tabel 2.3 Komponen dan Formula Kinerja Sosial Bank Syariah

Faktor Dinilai	Komponen	Formula/Rasio	Keterangan/Tujuan
Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE)	Intensitas pembiayaan *profit sharing* bank syariah (MMR)	*Mudharabah + Musyarakah* / *Total Pembiayaan*	Mengukur besarnya fungsi *intermediasi* bank syariah dengan akad *profit sharing*. Semakin besar hasil rasio ini maka kontribusi bank syariah untuk pengembangan sektor usaha semakin besar.
	Intensitas fungsi *agency* bank syariah (AR)	*DPK Profit Sharing* / *Total DPK*	Mengukur besarnya fungsi *agency* bank syariah. Semakin besar AR maka biaya sistemik saat likuidasi semakin kecil. Apabila biaya sistemik likuidasi menurun maka kebutuhan *financial safety net* turun.
	Kontribusi Pembangunan Jangka Panjang (KPJP)	*Pembiayaan Jangka Panjang* / *Total Aset*	Mengukur besarnya pembiayaan yang berjangka waktu diatas 5 tahun. Pembiayaan jangka panjang akan memberikan efek multiplikasi yang besar dan berdaya jangkau waktu jauh sehingga memberi manfaat yang lebih luas dalam perekonomian.
	Rasio Pendalaman Fungsi *Agency* (PFA)	*Deposito & Obligasi Mudharabah* / *Total Kewajiban*	Mengukur seberapa dalam fungsi *agency* bank syariah dalam menghimpun dana investasi masyarakat. Kedalaman ini berkaitan dengan horison waktu yang dipilih oleh investor. Karena semakin lama jangka waktu yang dipilih, juga akan memudahkan bank syariah untuk menginvestasikan pada pilihan-pilihan investasi yang baik secara ekonomi.
Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM)	Rasio Pembiayaan *Qardh* (QR)	*Pembiayaan Qard* / *Total Pembiayaan*	Mengukur besarnya kontribusi pembiayan *qard* bank syariah. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kepedulian bank syariah yang tinggi kepada pihak yang mengalami kesulitan.
	Rasio kinerja zakat (ZR)	*Penyaluran Zakat Perusahaan* / *Laba Sebelum Pajak*	Mengukur besarnya kontribusi zakat perusahaan bank syariah. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan *zakah performance* bank syariah yang baik.

	Rasio pelaksanaan fungsi sosial (RFS)	*Dana Zakat dan Kebajikan* *Modal Inti*	Mengukur besarnya pelaksanaan fungsi sosial bank syariah. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan pelaksanaan fungsi sosial bank syariah semakin tinggi.
	Rasio pelaksanaan fungsi edukasi (CSR)	*Biaya Promosi* *Biaya Operasional*	Mengukur besar fungsi *corporate social reponsibility (CSR)* terhadap proses pembelajaran masyarakat. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar peran bank syariah dalam proses pembelajaran masyarakat.
Kontribusi Untuk Stakeholder (KUS)	Rasio Kontribusi Kesejahteraan *Sohibul Maal* (KSM)	*Laba Setelah Pajak* *Modal Inti (Total Ekuitas)*	Mengukur besarnya keuntungan bank syariah yang dinikmati oleh pemegang saham. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kontribusi bank syariah atas peningkatan kesejahteraan *Sohibul Maal* yang baik.
	Rasio Alokasi Kesejahteraan *Mudharib* (KM)	*Biaya Gaji dan Kesejahteraan* *Pendapatan Operasional*	Mengukur besarnya proporsi alokasi pendapatan operasional bank syariah yang dinikmati oleh manajemen dan pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan lainnya. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan alokasi dari bank syariah untuk kesejahteraan *Mudharib* yang baik.
	Rasio Kontribusi Kesejahteraan Investor (KI)	*Distribusi Bagi Hasil* *Total DPK-ITT*	Mengukur besarnya keuntungan bank syariah yang dinikmati oleh Pemilik Rekening Tabungan dan Deposito *Mudharabah.* Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kontribusi bank syariah atas peningkatan kesejahteraan Investor yang baik.
	Rasio Kontribusi Kesejahteraan Pemegang *Wadiah* (KPW)	*Bonus Rekening Wadiah* *Total DPK-Wadiah*	Mengukur besarnya keuntungan bank syariah yang dinikmati oleh Pemilik Rekening Giro dan Tabungan *Wadiah.* Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kontribusi bank syariah atas peningkatan kesejahteraan Pemegang Rekening *Wadiah* yang baik.

	Rasio Kontribusi Pajak untuk Pemerintah (KPP)	*Beban Pajak Penghasilan Bersih* *Pendapatan Operasional*	Mengukur besarnya kontribusi pembayaran pajak bank syariah yang diterima oleh Pemerintah. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kontribusi bank syariah untuk pemerintah yang baik.
Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR)	Kontribusi Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR)	*Biaya Pendidikan dan Pelatihan* *Laba Setelah Pajak*	Mengukur besarnya alokasi dana untuk program pendidikan dan pelatihan pegawai. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan alokasi anggaran bank syariah untuk peningkatan kualitas SDInya yang baik.
	Rasio Alokasi Untuk Riset dan Pengembangan (R&D)	*Biaya Riset dan Development* *Laba Setelah Pajak*	Mengukur besarnya alokasi dana untuk program riset dan pengembangan institusinya. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan alokasi anggaran bank syariah untuk peningkatan riset dan pengembangannya yang baik.
Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE)	Rasio Pemerataan Distribusi Aset Nasional (PDAN)	*Aset Diluar Jawa* *Total Aset Nasional*	Mengukur proporsi aset bank syariah yang berada diluar Jawa dibandingkan dengan aset nasionalnya. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan disribusi pembangunan ekonomi bank syairah yang baik.
	Rasio Pemerataan Distribusi Investasi Nasional (PDIN)	*Investasi Nasabah Diluar Jawa* *Total Investasi Nasabah Nasional*	Mengukur proporsi investasi nasabah bank syariah yang berasal dari luar Jawa dibandingkan dengan total investasi nasabah nasionalnya. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan disribusi investasi nasabah bank syairah secara nasional yang baik.
	Rasio Kontribusi Pendapatan dari Luar Jawa (KPLJ)	*Pendapatan Dari Luar Jawa* *Total Investasi Nasabah Nasional*	Mengukur proporsi pendapatan bank syariah baik dari aktivitas pembiayaan maupun jasa yang berasal dari Luar Jawa dibandingkan dengan pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi proporsi pendapatan dari Luar Jawa mengindikasikan bahwa aktifitas pembiayaan, investasi dan layanan jasa bank syariah yang semakin tinggi di Luar Jawa.

Sumber: *Assessment* dan pengembangan dari penelitian sebelumnya.

Tabel 2.4 Ringkasan Substansi Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Judul	Tujuan	Metodologi	Hasil
Rosyadi (2007)	*Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah dengan Bank Konvensional Berdasarkan Rasio Keuangan. Studi Kasus: BMI dan 7 (tujuh) Bank Umum Konvensional*	Membandingkan kinerja keuangan BMI dengan Bank Mestika Darma (BMD), Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), American Express Bank (AEB), Bank Dagang Bali (BDB), Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD SUMUT), Bank Mayapada Internasional dan Bank Hagakita (Tahun 1994-2003).	Metode *inter-bank performance analysis* dengan membandingkan antara kinerja bank syariah dengan bank konvensional, dimana signifikansi perbedaaan kedua jenis bank dianalisis dengan alat uji statistik *independent samples t-test* dan untuk mengetahui perbedaannya secara mendetail digunakan *comparing means*. Penelitian ini menggunakan rasio keuangan: *Capital Adquacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Loan* (NPL), *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Loan to Deposit Rato* (LDR).	Secara umum kinerja BMI lebih baik dari bank umum konvensional, meski untuk beberapa rasio tidak lebih baik.
Rindawati (2007)	*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*.	Membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional pada periode 2001-2007. Sampel penelitian adalah dua kelompok, yaitu 2 bank umum syariah (BMI dan BSM) dan 6 bank umum konvensional (BPD Aceh, BPD DKI, BPD Kalimantan Timur, BPD Sumatera Utara, Bank Tabungan Pensiunan Nasional dan Bank Mizuho Indonesia).	Alat analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian tersebut adalah *independent sample t-test*. Ukuran kinerja bank yang digunakan adalah rasio keuangan bank yang meliputi *Capital Adequacy Ratio* (mewakili rasio permodalan), *Non Performing Loan* (mewakili rasio kualitas aktiva produktif), *Return on Asset* dan *Return on Equity* (mewakili rasio rentabilitas), Beban Operasional dibagi Pendapatan Operasional (mewakili rasio efisiensi), dan *Loan to Deposit Ratio* (mewakili rasio likuiditas).	Rata-rata rasio keuangan perbankan syariah (NPL dan LDR) lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional, sedangkan pada rasio-rasio yang lain perbankan syariah lebih rendah kualitasnya. Tetapi Jika dilihat secara keseluruhan perbankan syariah menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan perbankan konvensional.
Mahfudz (2006)	*Performance Evaluation of Islamic Commercial Banks In Indonesia After The Financial Crisis*.	Mengevaluasi kinerja bank syariah di Indonesia setelah krisis (1999-2004) dan juga kontribusinya dalam pengembangan UMKM (2000-2002).	Dalam penelitian digunakan metode *inter-bank performance analysis.* Indikator kinerja yang digunakan adalah rasio *profitability, liquidity, risk and solvency*. Tahap pertama dilakukan komparasi perbandingan kinerja BMI dengan BSM. Berikutnya dibandingkan dua bank tersebut (BMI & BSM) dengan 5 (lima) bank konvensional besar (Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, dan Bank Danamon).	Kinerja keuangan BMI lebih baik dari BSM. Tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja bank syariah dengan bank konvensional diatas. Meski demikian kontribusi dalam pengembangan UMKM bank syariah lebih baik.

Peneliti	Judul	Tujuan	Metodologi	Hasil
Prawira (2007)	Perbandingan Kinerja PT. Bank Jabar Syariah Sebelum dan Sesudah Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank.	Melihat perbedaan kinerja PT. Bank Jabar Syariah sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang haramnya bunga bank.	Teknik analisis data adalah dengan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji beda dua rata-rata (uji t). Adapun rasio keuangan yang digunakan: (a) Rasio Profitabilitas, yaitu *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE); (b) Rasio Efisiensi Perbankan, yaitu Rasio Biaya Operasional dibanding dengan Pendapatan Operasional (BOPO); (c) Rasio Likuiditas, yaitu *Loan to Deposit Rato* (LDR); dan (d) Rasio Solvabilitas, yaitu menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER).	Ssecara keseluruhan kinerja PT. Bank Jabar Syariah mempunyai perbedaan yang signifikan, dimana secara umum setelah keluarnya fatwa MUI 16 Desember 2003 menjadi lebih baik. Penghimpunan dana masyarakat meningkat, terutama tabungan mudharabah. Demikian juga penyaluran dana melalui pembiayaan musyarakah naik 2 persen, pembiayaan mudharabah 0,06 persen dan SWBI sebesar 11,3 persen.
Arsil (2007)	Analisis Kinerja Bank Syariah Ditinjau dari Pengaruh Eksternal (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2000–Juni 2003)	Meneliti dampak variabel makro seperti Suku Bunga SBI, Gross National Product (GNP), Indeks Harga Saham Habungan (IHSG), dan Nilai Tukar Rupiah terhadap kinerja keuangan.	Kinerja keuangan sebagai variabel dependen yang digunakan antara lain *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE), *Loan to Deposit Rato* (LDR) dan *Capital Adquacy Ratio* (CAR).	SBI mempengaruhi ROE, GNP dan SBI mempengaruhi ROA, nilai tukar terhadap dolar mempengaruhi LDR, dan GNP mempengaruhi CAR. Hasil penelitian juga menunjukkan faktor eksternal yang berpengaruh positif terhadap kinerja BSM adalah SBI dan IHSG.
Samad dan Hasan (2000)	*The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Study*	Membandingkan kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dengan Bank Pertanian serta Bank Perwira Affin	Kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dibandingkan dengan Bank Pertanian serta Bank Perwira Affin. Rasio *profitability* yang digunakan antara lain: *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan *Profit Expense Ratio* (PER). Rasio *liquidity* mencakup *Cash Deposit Ratio* (CDR), *Loan Deposit Ratio* (LDR), *Current Ratio* (CR), dan *Current Asset Ratio* (CAR). Berikutnya rasio *risk and solvency* mencakup *Debt equity ratio* (DER), *Debt to total asset ratio* (DTAR), *Equity multiplier* (EM), dan *Loan to deposit ratio* (LDR). Sedangkan untuk mengevaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi digunakan *Long term loan ratio* (LTA), *Government Bond Investment ratio* (GBD), serta *Mudaraba-Musharaka Ratio* (MM/L).	ROA dan ROE BIMB pada akhir periode lebih baik (diuji dengan t-test). Tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan antara ROA dan ROE BIMB dan kelompok bank konvensional. Selain itu likuiditas BIMB lebih baik dibanding kelompok bank konvensional, dilihat dari DER, LDR dan CR. BIMB juga memiliki risiko lebih rendah dan solvensi yang lebih baik bila dilihat dari DER, DTAR, EM dan LDR dibanding kelompok bank konvensional. Sayangnya kontribusi terhadap pembangunan tidak lebih baik dibandingkan dengan kelompok bank konvensional, meski F-value tidak signifikan (ditunjukkan oleh GBD, LTA dan MM/L).

Peneliti	Judul	Tujuan	Metodologi	Hasil
Hameed, et. all. (2004)	*Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's*	Mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic Bank (BIB) secara deskriptif.	Selain merumuskan *Islamicity Disclosure Index* juga merancang apa yang disebut *"Islamicity Performance Index"*. Dengan indeks tersebut mencoba mengakomodasi kepentingan stakeholder bank syariah secara lebih luas. Dalam *Islamicity Performance Index*, mereka memasukkan *Profit sharing ratio* (*Mudaraba+Musyarakah/Total financing*), *Zakat* performance ratio (*Zakat/Net Asset*), *Equitable distribution ratio*, *Directors-Employees welfare ratio*, *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment ratio*, dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income ratio*.	BIB secara umum memliki kinerja sosial lebih baik dari BIMB. Dalam *Islamicity Performance Index* sebagian besarnya dapat disebut sebagai kinerja sosial sebagaimana alat evaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi yang digunakan oleh Samad dan Hasan diatas.

Sumber: *Assesment* dari penelitian-penelitian sebelumnya.

III. HASIL ANALISIS KESEHATAN FINANSIAL DAN KINERJA SOSIAL

3.1. Kesehatan Finansial BMI dan BSM

Pada bagian ini akan dideskripsikan hasil perhitungan dan analisis penilaian kesehatan finansial BMI dan BSM yang mencakup: kualitas aset (*asset quality*), rentabilitas (*earning*), dan likuiditas (*liquidity*). Setelah masing-masing bagian kesehatan finansial ini dianalisis, kemudian dilanjutkan dengan analisis tingkat kesehatan finansial tahunan yang merupakan kumulatif dari seluruh komponen untuk setiap tahun serta rata-rata dalam lima tahun. Data yang digunakan untuk melakukan analisis diolah dari Laporan Keuangan BMI dan BSM yang telah diaudit tahun 2003-2007.

3.1.1 Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap dua rasio penting yaitu kualitas aktiva produktif BMI dan BSM dan besarnya pembiayaan *non performing*.

3.1.1.1 Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Melalui perhitungan kualitas aktiva produktif (KAP) BMI dan BSM dapat diketahui kondisi aset produktifnya untuk mengantisipasi risiko gagal bayar dari pembiayaan (*financing risk*). KAP BMI dan BSM dihitung dengan cara mengurangkan satu dengan Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan *Non-Performing* (APYD) terhadap total Aktiva Produktif. APYD sendiri adalah aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang dihitung khusus. Sedangkan aktiva produktif adalah penanaman dana BMI dan BSM baik dalam rupiah maupun valuta asing yang menghasilkan keuntungan (*return*).

Nilai rata-rata KAP BMI pada periode tahun 2003-2007 lebih tinggi dari nilai KAP BSM sebesar 1,24%. Nilai rata-rata KAP BMI adalah sebesar 97,42% sedangkan nilai rata-rata KAP BSM mencapai 96,18%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas aktiva produktif BMI lebih baik dari BSM pada periode ini. Nilai KAP BMI tertinggi adalah sebesar 97,91% terjadi pada tahun 2005 dan terendah sebesar 96,22% terjadi pada tahun 2006. Sedangkan nilai KAP BSM terendah sebesar 93,92% terjadi pada tahun 2006 dan tertinggi sebesar 98,00% pada tahun 2003.

Berdasarkan kriteria penilaian peringkat untuk rasio KAP menurut BI (2007) maka nilai KAP BMI masing-masing tahun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 berada dalam peringkat 2 seluruhnya, karena masih dalam nilai kisaran peringkat ini yang ditetapkan diatas 96% sampai dengan 99%. Sedangkan nilai KAP BSM tahun 2003, 2004 dan 2005 masing-masing memperoleh peringkat 2. Dan untuk tahun 2006 dan 2007 nilai KAP BSM berada dalam peringkat 3, karena berada dalam range peringkat tersebut yaitu diatas 93% sampai dengan 96%. Adapun kriteria penilaian peringkat untuk rasio KAP tersebut menurut BI (2007) adalah: Peringkat 1 = KAP > 0,99; Peringkat 2 = 0,96 < KAP ≤ 0,99; Peringkat 3 = 0,93 < rasio KAP ≤ 0,96; Peringkat 4 = 0,90 < rasio KAP ≤ 0,93; dan Peringkat 5 = KAP ≤ 0,90.

Grafik 4.11 Kualitas Aktiva Produktif BMI dan BSM
Tahun 2003-2007
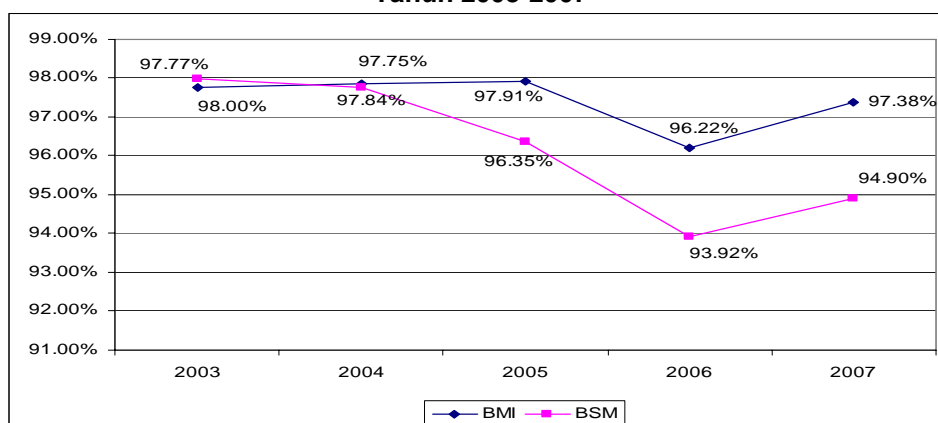
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

3.1.1.2 Pembiayaan *Non-Performing* (NPF)

Rasio Pembiayaan *Non Performing* (NPF) digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh BMI dan BSM. Rasio NPF dihitung dengan membandingkan piutang dan pembiayaan yang *non-performing* terhadap total piutang dan pembiayaan. Piutang terdiri dari tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *istishna* dan atau *ijarah*. Sedangkan pembiayaan mencakup pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *qardh*. Komponen pembiayaan *non-performing* disini mencakup kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M).

Nilai rata-rata NPF BMI pada periode tahun 2003-2007 lebih baik dari nilai NPF BSM. Nilai rata-rata NPF BMI adalah sebesar 3,62% lebih rendah 0,66% dari nilai rata-rata NPF BSM yang mencapai 4,28%. Hal ini juga menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan BMI lebih baik dari kualitas pembiayaan BSM. Nilai NPF BMI terburuk adalah sebesar 5,89% terjadi pada tahun 2006 dan terbaik sebesar 2,92% terjadi pada tahun 2005. Sedangkan nilai NPF BSM terbaik sebesar 2,42% terjadi pada tahun 2004 dan tertinggi sebesar 6,94% pada tahun 2006.

Kriteria penilaian peringkat untuk rasio NPF ini menurut BI (2007) adalah: Peringkat 1 = NPF < 2%; Peringkat 2 = 2% ≤ NPF < 5%; Peringkat 3 = 5% ≤ NPF < 8%; Peringkat 4 = 8% ≤ NPF < 12%; dan Peringkat 5 = NPF ≥ 12%. Maka dengan demikan nilai NPF BMI tahun 2003, 2004, 2005 dan 2007 berada dalam peringkat 2, karena dalam nilai kisaran peringkat ini yang ditetapkan 2% sampai dengan kurang dari 5%. Sedangkan nilai NPF BMI tahun 2006 berada dalam peringkat 3, antara 5% sampai dengan kurang dari 8%. Sedangkan nilai NPF BSM tahun 2003, 2004 dan 2005 masing-masing memperoleh peringkat 2. Dan untuk tahun 2006 dan 2007 nilai NPF BSM berada dalam peringkat 3.

Grafik 4.2 Rasio Pembiayaan *Non Performing* BMI dan BSM Tahun 2003-2007
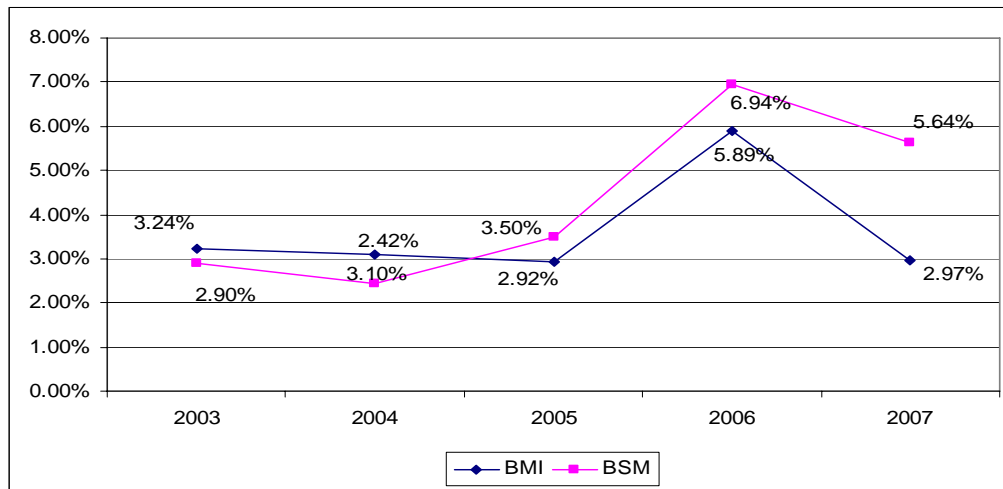
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

3.1.2 Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas BMI dan BSM dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap enam rasio penting. Hasil analisis akan dideskripsikan pada bagian ini, mencakup rasio *Net Operating Margin* (NOM), *Return on Assets* (ROA), Rasio Efisiensi Operasional (REO), Diversifikasi Pendapatan (DP), *Return on Equity* (ROE), dan Komposisi Penempatan Dana pada Surat Berharga (IdFR).

3.1.2.1 *Net Operating Margin* (NOM)

Melalui hasil penghitungan rasio *Net Operating Margin* (NOM) ini dapat diketahui kemampuan aktiva produktif BMI dan BSM dalam menghasilkan laba. Nilai NOM dihasilkan dari membagi Laba Operasional dengan Aktiva Produktif (AP). Laba Operasional diperoleh dari Pendapatan Operasional (PO) setelah Distribusi Bagi Hasil (DBH) dikurangi Biaya Operasional (BO). Biaya Operasional sendiri mencakup beban operasional termasuk kekurangan PPAP yang wajib dibentuk.

Nilai rata-rata NOM BMI pada periode tahun 2003-2007 lebih baik dari nilai NOM BSM. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan aktiva produktif BMI dalam menghasilkan laba lebih baik dari BSM. Nilai rata-rata NOM BMI adalah sebesar 0,70% lebih tinggi 0,82% dari nilai rata-rata NOM BSM yang hanya -0,12%. Nilai NOM BMI terburuk adalah sebesar -0,11% terjadi pada tahun 2003 dan terbaik sebesar 1,14% terjadi pada tahun 2005. Sedangkan nilai NOM BSM terburuk sebesar -0,92% terjadi pada tahun 2003 dan tertinggi sebesar 0,60% pada tahun 2004.

Adapun peringkat untuk rasio NOM BSM, berdasarkan kriteria penilaian BI (2007), tahun 2003-2007 seluruhnya berada pada peringkat 5, karena nilai seluruhnya dibawah 1%. Sedangkan nilai NOM BMI tahun 2003 dan 2004 memperoleh peringkat 5. Dan untuk tahun 2005, 2006 dan 2007, nilai NOM BMI membaik dan berada dalam peringkat 4, nilainya dalam kisaran diatas 1% sampai dengan 1,5%. Hal ini mengacu pada kriteria penilaian peringkat rasio NOM BI (2007) sebagai berikut: Peringkat 1 =

NOM > 3%; Peringkat 2 = 2% < NOM ≤ 3%; Peringkat 3 = 1,5% < NOM ≤ 2%; Peringkat 4 = 1% < NOM ≤ 1,5%; dan Peringkat 5 = NOM ≤ 1%.

Grafik 4.3 Rasio *Net Operating Margin* (NOM) BMI dan BSM
Tahun 2003-2007
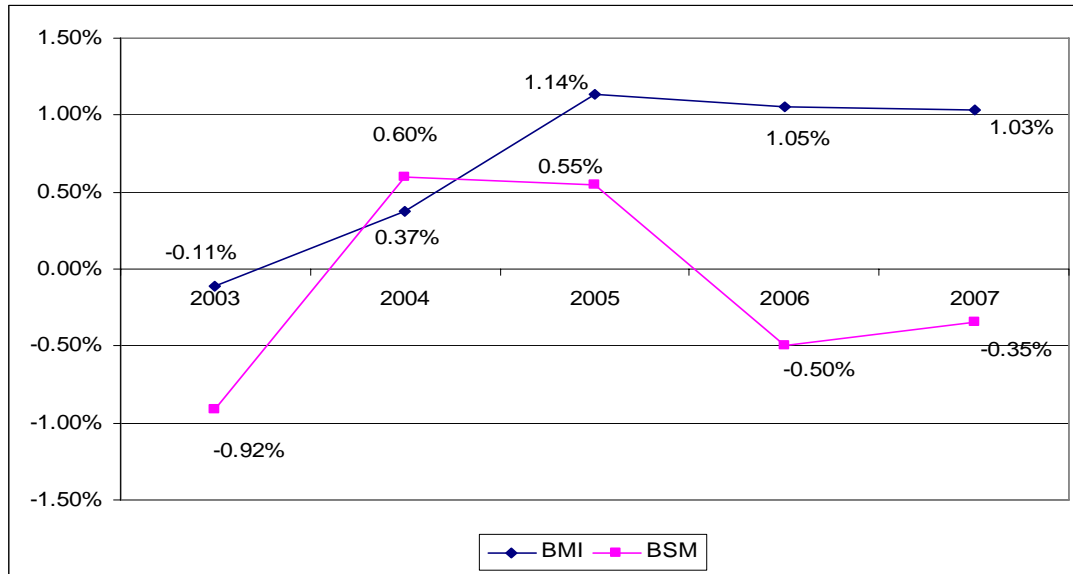
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

3.1.2.2 *Return on Assets* (ROA)

Rasio *Return on Assets* (ROA) digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur keberhasilan manajemen BMI dan BSM dalam menghasilkan laba. ROA dihitung dengan membagi Laba Sebelum Pajak dengan Total Aset.

Nilai rata-rata ROA BSM *pada* periode tahun 2003-2007 lebih rendah dari nilai ROA BMI. Nilai rata-rata ROA BSM adalah sebesar 1,37%, lebih rendah 0,33% dari nilai rata-rata ROA BMI yang mencapai 1,70%. Hal ini menunjukkan kemampuan manajemen BMI dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan lebih baik dari manajemen BSM. Nilai ROA BSM terendah adalah sebesar 0,72% terjadi pada tahun 2003 dan tertinggi sebesar 2,19% terjadi pada tahun 2004. Sedangkan nilai ROA BMI terendah sebesar 1,04% terjadi pada tahun 2003 dan tertinggi sebesar 2,10% pada tahun 2005.

Adapun *kriteria* penilaian peringkat ROA ini menurut BI (2007) adalah: Peringkat 1 = ROA > 1,5%; Peringkat 2 = 1,25% < ROA ≤ 1,5%; Peringkat 3 = 0,5% < ROA ≤ 1,25%; Peringkat 4 = 0% < ROA ≤ 0,5%; dan Peringkat 5 = ROA ≤ 0%. Maka dengan demikian peringkat untuk rasio ROA BMI, tahun 2003 berada pada peringkat 3, tahun 2004 masuk peringkat 2, dan tahun 2005, 2006 dan 2007 berada dalam peringkat 1. Sedangkan nilai ROA BSM tahun 2003 dan 2006 memperoleh peringkat 3. Dan untuk tahun 2004 dan 2005 nilai ROA BSM berada dalam peringkat 1, sedangkan tahun 2007 berada dalam peringkat 2.

**Grafik 4.4 Rasio *Return on Assets* (ROA) BMI dan BSM
Tahun 2003-2007**
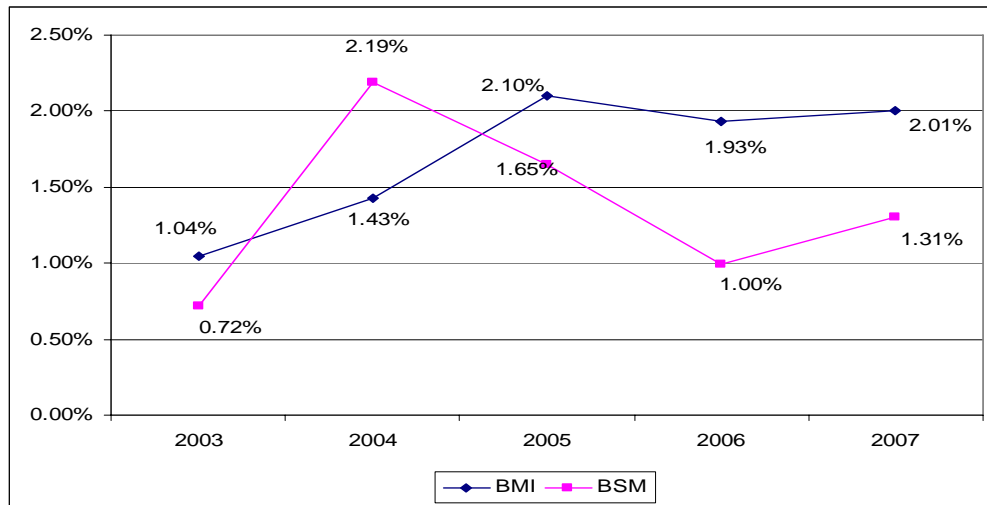
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

3.1.2.3 Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO)

Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO) dalam hal ini digunakan untuk mengukur efisiensi kegiatan operasional BMI dan BSM. REO didapatkan dengan membagi Biaya Operasional (BO) dengan Pendapatan Operasional (PO). Data BO yang digunakan adalah beban operasional termasuk kekurangan PPAP. Sedangkan data PO yang digunakan adalah data pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil.

**Grafik 4.5 Rasio Efisiensi Operasional (REO) BMI dan BSM
Tahun 2003-2007**
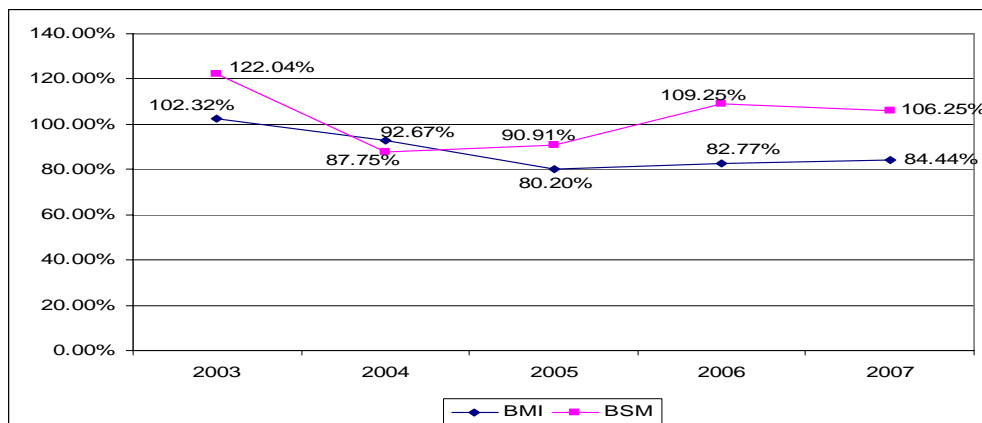
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

Pada periode tahun 2003-2007, efisiensi kegiatan operasional BMI lebih baik dari BSM. Hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata REO BMI pada periode tersebut yang lebih rendah dari nilai REO BSM. Nilai rata-rata REO BMI adalah sebesar 88,48%, lebih rendah 14,76% dari nilai rata-rata REO BSM yang mencapai 103,24%. Efisiensi kegiatan operasional terbaik BMI terjadi tahun 2005 dengan nilai REO adalah sebesar 80,20% dan terburuk sebesar 102,32% terjadi pada tahun 2003. Sedangkan efisiensi terbaik BSM dengan nilai REO sebesar 87,75% terjadi pada tahun 2004 dan terburuk sebesar 122,04%

pada tahun 2003. Efisiensi kegiatan operasional BSM lebih baik dari BMI terjadi pada tahun 2004.

Adapun kriteria penilaian peringkat REO menurut BI (2007) adalah: Peringkat 1 = REO ≤ 83%; Peringkat 2 = 83% < REO ≤ 85%; Peringkat 3 = 85% < REO ≤ 87%; Peringkat 4 = 87% < REO ≤ 89%; dan Peringkat 5 = REO > 89%. Maka dengan demikian peringkat untuk rasio REO BMI, tahun 2003 dan 2004 berada pada peringkat 5, tahun 2005 dan 2006 masuk peringkat 1, dan tahun 2007 berada dalam peringkat 2. Sedangkan nilai REO BSM tahun 2003, 2005, 2006 dan 2007 memperoleh peringkat 5. Kecuali untuk tahun 2004 nilai REO BSM berada dalam peringkat 4.

3.1.2.4 Diversifikasi Pendapatan (DP)

Rasio Diversifikasi Pendapatan (DP) ini digunakan untuk mengukur kemampuan BMI dan BSM dalam menghasilkan pendapatan dari jasa berbasis *fee*. Rasio DP ini dihitung dengan membagi pendapatan berbasis *fee* dengan pendapatan dari penyaluran dana. Pendapatan berbasis *fee* merupakan pendapatan yang diperoleh BMI dan BSM dari jasa-jasa perbankan yang diberikan. Pendapatan dari penyaluran dana adalah pendapatan yang berasal dari penyaluran dana setelah dikurangi bagi hasil untuk investor dana investasi.

Diversifikasi pendapatan BSM pada periode tahun 2003-2007 lebih baik dari BMI. Hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata rasio DP BSM yang lebih tinggi dari nilai rasio DP BMI. Nilai rata-rata rasio DP BSM adalah sebesar 30,47%, lebih tinggi 9,05% dari nilai rata-rata rasio DP BMI yang hanya mencapai 21,42%. Hal ini mengindikasikan ketergantungan BSM terhadap pendapatan dari penyaluran dana lebih rendah dari BMI.

Diversifikasi pendapatan BSM terbaik terjadi tahun 2003 dengan nilai rasio DP adalah sebesar 39,63% dan terendah sebesar 19,54% terjadi pada tahun 2005. Sedangkan diversifikasi pendapatan terbaik BMI dengan nilai rasio DP sebesar 26,51% terjadi pada tahun 2003 dan terendah sebesar 17,72% pada tahun 2007. Diversifikasi pendapatan BMI lebih baik dari BSM hanya terjadi pada tahun 2005, dimana BMI mencapai rasio DP 19,82%.

Grafik 4.6 Rasio Diversifikasi Pendapatan (DP) BMI dan BSM Tahun 2003-2007
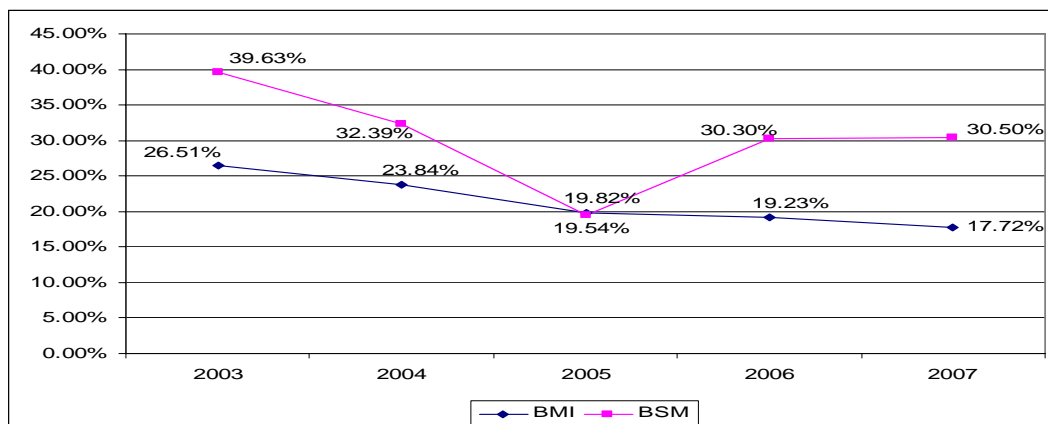
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

BI (2007) telah menetapkan kriteria penilaian peringkat dalam rasio DP adalah sebagai berikut: Peringkat 1 = DP > 12%; Peringkat 2 = 9% < DP ≤ 12%; Peringkat 3 = 6% < DP ≤ 9%; Peringkat 4 = 3% < DP ≤ 6%; dan Peringkat 5 = DP ≤ 3%. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa, baik bagi BMI dan BSM untuk keseluruhan tahun 2003-2007 nilai rasio DP-nya lebih besar dari 12%, dengan demikian seluruhnya mendapat peringkat 1.

3.1.2.5 *Return on Equity* (ROE)

Rasio *Return on Equity* (ROE) dalam analisis ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal disetor BMI dan BSM dalam menghasilkan laba. ROE dihitung dengan membagi laba setelah pajak dengan modal disetor. Cakupan modal disetor termasuk agio dan disagio saham. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar.

Pada periode tahun 2003-2007 kemampuan modal disetor BSM dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham lebih tinggi dari BMI. Hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata ROE BSM yang lebih tinggi dari nilai ROE BMI. Nilai rata-rata ROE BSM adalah sebesar 21,43%, lebih tinggi 1,34% dari nilai rata-rata ROE BMI yang mencapai 20,10%. ROE BSM terbaik dengan nilai sebesar 32,22% terjadi tahun 2007 dan terendah sebesar 4,42% terjadi pada tahun 2003. Sedangkan ROE terbaik BMI dengan nilai sebesar 29,49% terjadi pada tahun 2007 dan terendah sebesar 8,59% pada tahun 2003. ROE BMI lebih baik dari BSM terjadi pada tahun 2003 dan 2006.

Grafik 4.7 Rasio *Return on Equity* (ROE) BMI dan BSM Tahun 2003-2007
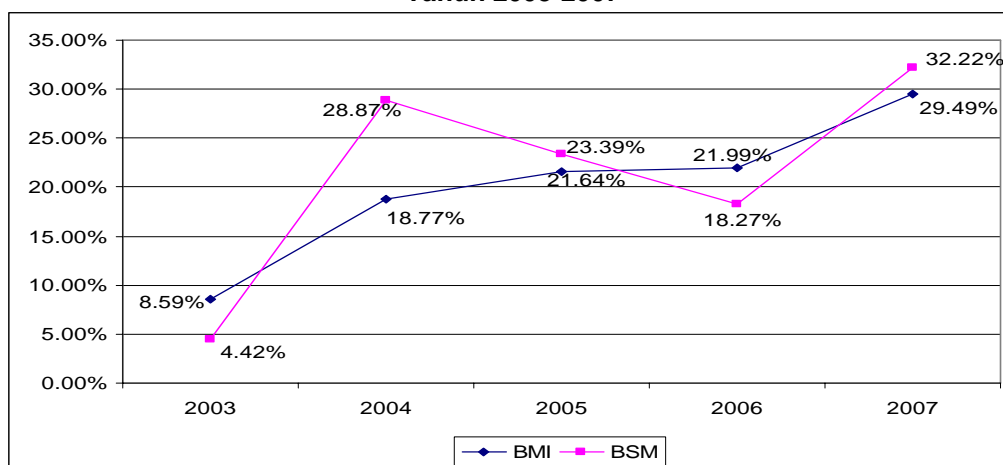
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

Dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah menurut BI (2007), ROE merupakan rasio pengamatan (*observed*). Karena rasio pengamatan kriteria penilaian peringkat untuk rasio ini tidak ada. Maka dengan demikian tidak perlu dibuat pemeringkatan, dan komponen ini nantinya tidak dimasukkan dalam penilaian akumulatif kesehatan finansial BMI dan BSM.

3.1.2.6 Komposisi Penempatan Dana pada Surat Berharga/Pasar Keuangan (IdFR)

Rasio komposisi penempatan dana pada surat berharga (IdFR) dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur besarnya penempatan dana BMI dan BSM pada surat berharga dan pasar keuangan. Untuk mendapatkan nilai rasio ini diakumulasikan terlebih dahulu nilai penempatan dana BMI dan BSM pada SWBI, surat berharga dan penyertaan kemudian dibagi dengan total aktiva produktif. Surat berharga mencakup SWBI dan surat berharga yang meliputi surat berharga pada bank lain maupun pada non bank. Penyertaan termasuk penyertaan pada bank lain.

Hasil perhitungan menunjukkan pada periode tahun 2003-2007 fungsi intermediasi BMI lebih optimal dibandingka dengan BSM. Hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata rasio IdFR BSM yang lebih tinggi dari nilai rasio IdFR BMI. Nilai rata-rata rasio IdFR BSM adalah sebesar 17,55%, lebih tinggi 5,68% dari nilai rata-rata rasio IdFR BMI yang hanya 11,87%. Nilai rasio IdFR BSM terbaik dengan nilai sebesar 11,81% terjadi tahun 2004 dan tertinggi sebesar 27,62% terjadi pada tahun 2003. Sedangkan nilai rasio IdFR terbaik BMI dengan nilai sebesar 7,10% terjadi pada tahun 2007 dan tertinggi sebesar 18,95% pada tahun 2003. Nilai rasio IdFR BMI untuk keseluruhan tahun lebih baik dari BSM.

Grafik 4. 8 Rasio Penempatan Pada Surat Berharga (IdFR) BMI dan BSM Tahun 2003-2007
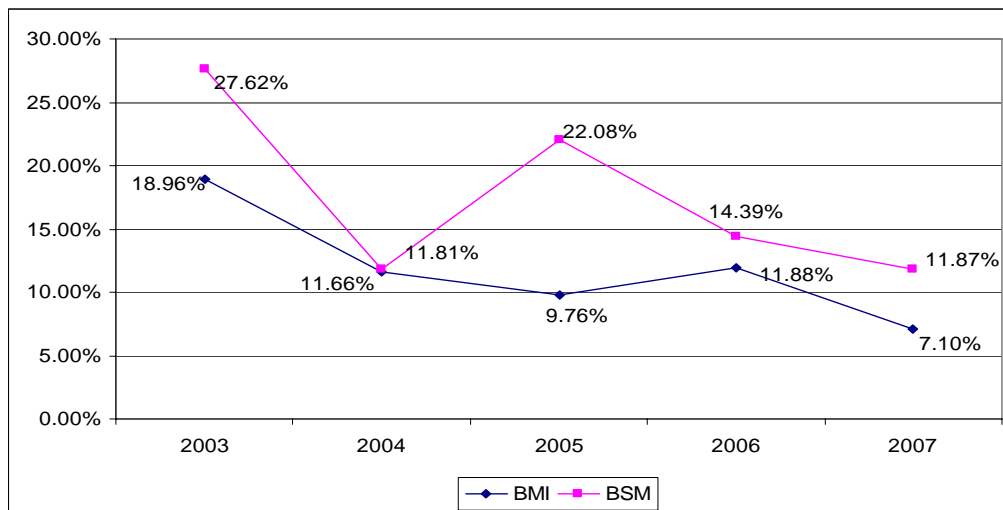
Tahun	2003	2004	2005	2006	2007
BMI	18.96%	11.66%	9.76%	11.88%	7.10%
BSM	27.62%	11.81%	22.08%	14.39%	11.87%

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

Dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah menurut BI (2007), komposisi penempatan dana pada surat berharga (IdFR) merupakan rasio pengamatan (*observed*). Karena rasio pengamatan kriteria penilaian peringkat untuk rasio ini tidak ada. Maka dengan demikian dalam penelitian ini juga dibuat pemeringkatan, dan komponen ini nantinya juga tidak dimasukkan dalam penilaian akumulatif kesehatan finansial BMI dan BSM. Maka dengan demikian, kesehatan finansial secara kumulatif dari sisi rentabilitas hanya diwakili rasio *Net Operating Margin* (NOM), *Return on Assets* (ROA), Rasio Efisiensi Operasional (REO), dan Diversifikasi Pendapatan (DP). Rasio *Return on Equity* (ROE) dan Komposisi Penempatan Dana pada Surat Berharga (IdFR) tidak digunakan.

3.1.3 Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian likuiditas dalam penelitian kesehatan finansial ini untuk menilai kemampuan BMI dan BSM dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Dalam bagian ini akan dideskripsikan penilaian kuantitatif faktor likuiditas yang dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap tiga komponen rasio yaitu: *Short Term Mismatch* (STM), *Short Term Mismatch Plus* (STMP) dan Rasio Antar Bank Pasiva (RABP).

3.1.3.1 Besarnya Aset Jangka Pendek Dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Pendek (*Short Term Mismatch*/STM)

Rasio besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek (STM) digunakan untuk mengukur kemampuan BMI dan BSM dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Aset jangka pendek adalah aktiva likuid kurang dari 3 bulan selain kas, SWBI dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam laporan *maturity profile* yang terdapat dalam Laporan Berkala-nya. Sedangkan kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban likuid kurang dari 3 bulan yang juga terdapat dalam laporan *maturity profile* tersebut.

Berdasarkan rasio STM ini, pada periode tahun 2003-2007, likuiditas BSM lebih baik dari BMI. Hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata rasio STM BSM yang lebih tinggi dari nilai rasio STM BMI. Nilai rata-rata rasio STM BSM adalah sebesar 25,15%, lebih tinggi 2,62% dari nilai rata-rata rasio STM BMI sebesar 22,53%. Likuiditas BSM tertinggi terjadi tahun 2004 dengan nilai rasio STM adalah sebesar 26,78% dan terendah sebesar 23,33% terjadi pada tahun 2004. Sedangkan Likuiditas tertinggi BMI dengan nilai rasio STM sebesar 29,62% terjadi pada tahun 2004 dan terendah sebesar 16,87% pada tahun 2006. Likuiditas BMI lebih tinggi dari BSM hanya terjadi pada tahun 2004.

Grafik 4.9 Rasio *Short Term Mismatch* (STM) BMI dan BSM Tahun 2003-2007
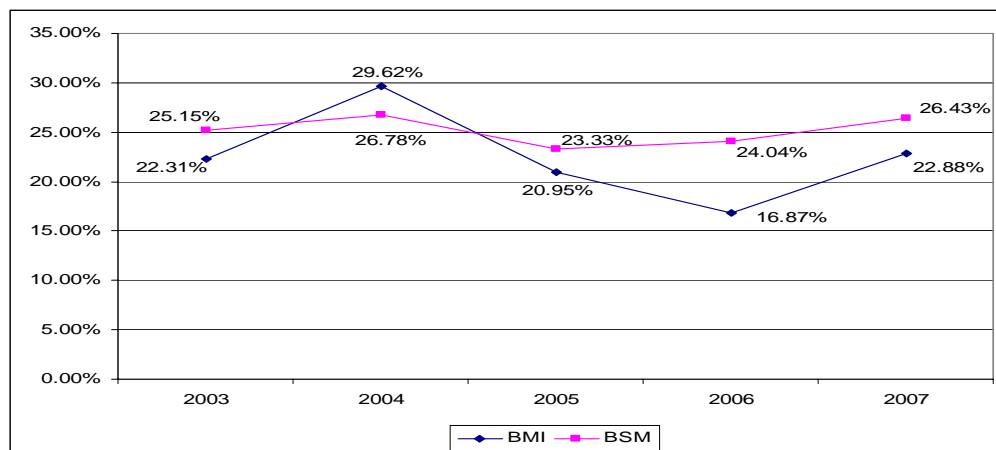
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

BI (2007) telah menetapkan kriteria penilaian peringkat dalam rasio STM adalah sebagai berikut: Peringkat 1 = STM > 25%; Peringkat 2 = 20% < STM ≤ 25%; Peringkat 3 =15% < STM ≤ 20%; Peringkat 4 = 10% < STM ≤ 15%; dan Peringkat 5 = STM ≤ 10%. Maka dengan demikian peringkat untuk rasio STM BSM, tahun 2003, 2004 dan 2007

berada pada peringkat 1, tahun 2005 dan 2006 masuk peringkat 2. Sedangkan nilai rasio STM BSM tahun 2003, 2005 dan 2007 memperoleh peringkat 2, tahun 2004 meraih peringkat 1 dan tahun 2006 meraih peringkat 3.

3.1.3.2 Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan *Secondary Reserve* dalam Memenuhi Kewajiban Jangka Pendek (*Short Term Mismatch Plus*/STMP)

Rasio kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan *Secondary Reserve* dalam memenuhi Kewajiban Jangka Pendek (STMP), digunakan untuk mengukur kemampuan BMI dan BSM dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva jangka pendek, kas, dan *secondary reserve*. Aset jangka pendek dan kewajiban jangka pendek memiliki rincian yang sama seperti untuk menghitung STMP. Sedangkan kas adalah uang tunai dan *secondary reserve* mencakup Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) ditambah dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pada periode tahun 2003-2007, berdasarkan rasio STMP likuiditas BMI lebih baik dari BSM. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya ketika likuiditas dilihat dari nilai rasio STM. Nilai rata-rata rasio STMP BMI adalah sebesar 45,04%, lebih tinggi 2,78% dari nilai rata-rata rasio STMP BSM yang hanya sebesar 42,26%. Nilai rasio STMP BMI tertinggi terjadi tahun 2004 dengan nilai sebesar 58,74% dan terendah sebesar 33,18% terjadi pada tahun 2006. Sedangkan rasio STMP tertinggi BSM dengan nilai sebesar 62,20% terjadi pada tahun 2003 dan terendah sebesar 34,07% pada tahun 2004.

Grafik 4.10 Rasio *Short Term Mismatch Plus* (STMP) BMI dan BSM Tahun 2003-2007
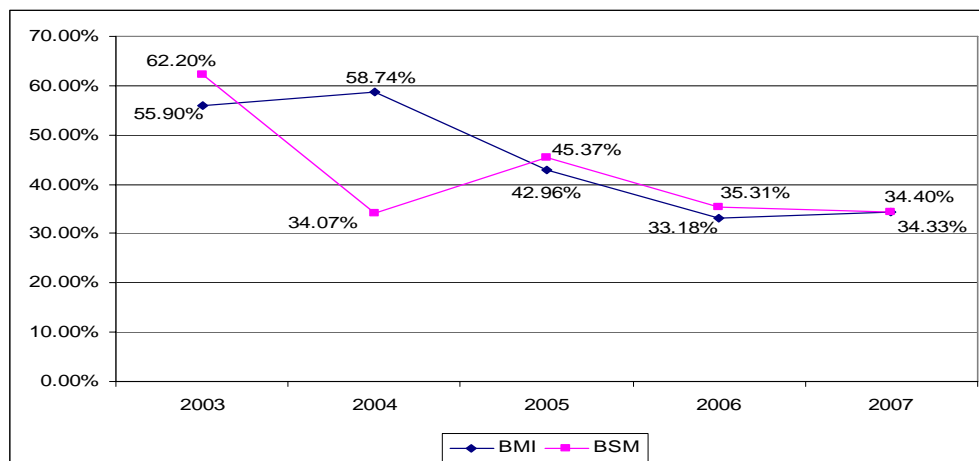
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

Kriteria penilaian peringkat untuk rasio STMP menurut standar BI (2007) adalah sebagai berikut: Peringkat 1 = STMP ≥ 50%; Peringkat 2 = 40% ≤ STMP < 50%; Peringkat 3 = 30% ≤ STMP < 40%; Peringkat 4 = 20% ≤ STMP < 30%; dan Peringkat 5 = STMP < 20%. Maka dengan demikian peringkat untuk rasio STMP BSM, tahun 2003 berada pada peringkat 1, tahun 2004, 2006 dan 2007 masuk peringkat 3, dan tahun 2005 pada peringkat 2. Sedangkan nilai rasio STMP BMI tahun 2003 dan 2004 memperoleh peringkat 1, tahun 2005 meraih peringkat 2 dan tahun 2006 serta 2007 meraih peringkat 3.

3.1.3.2 Rasio Antar Bank Pasiva (RABP)

Rasio Antar Bank Pasiva (RABP), dalam penelitian ini merupakan rasio pengamatan (*observed*) dalam perhitungan likuiditas yang digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan BMI dan BSM pada dana antar bank. Nilai RABP didapatkan dengan membandingkan nilai Antar Bank Pasiva dengan Total Kewajiban. Antar Bank Pasiva merupakan semua kewajiban bank syariah kepada bank lain. Sedangkan Total Kewajiban terdiri dari Dana Pihak Ketiga, Antar Bank Pasiva, Pinjaman yang diterima, dan Surat Berharga yang diterbitkan.

Hasil perhitungan menunjukkan pada periode tahun 2003-2007 tingkat ketergantungan BMI pada dana antar bank lebih tinggi dibandingkan dengan BSM. Hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata RABP BMI yang lebih tinggi dari nilai RABP BMI. Nilai rata-rata RABP BMI adalah sebesar 2,63%, lebih tinggi 0,63% dari nilai rata-rata RABP BSM yang hanya 2,00%. Nilai RABP BSM terbaik dengan nilai sebesar 0,51% terjadi tahun 2006 dan tertinggi sebesar 3,34% terjadi pada tahun 2004. Sedangkan nilai RABP terbaik BMI dengan nilai sebesar 0,64% terjadi pada tahun 2004 dan tertinggi sebesar 5,71% pada tahun 2005.

Grafik 4.11 Rasio Antar Bank Pasiva (RABP) BMI dan BSM Tahun 2003-2007
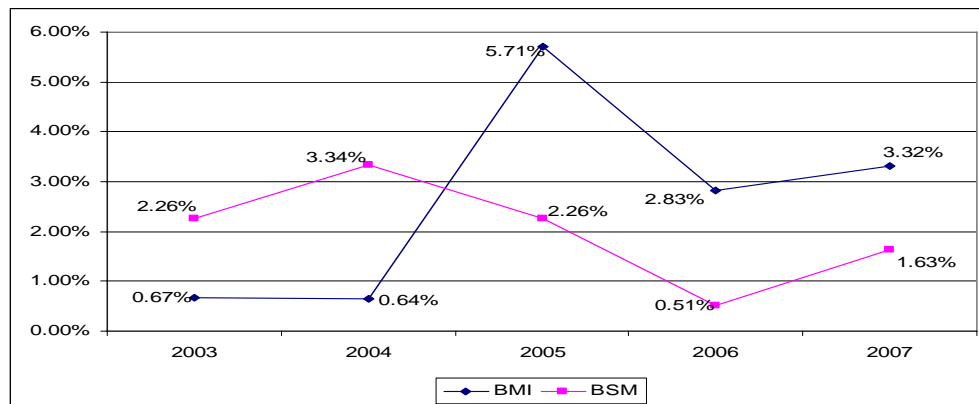
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

Dalam menghitung likuiditas bagi bank syariah menurut BI (2007), Rasio Antar Bank Pasiva (RABP) merupakan rasio pengamatan (*observed*), karenanya kriteria penilaian peringkat untuk rasio ini tidak ada. Maka dengan demikian dalam penelitian ini juga tidak dibuat pemeringkatan, dan komponen ini nantinya juga tidak dimasukkan dalam penilaian akumulatif kesehatan finansial BMI dan BSM. Kesehatan finansial dari sisi likuiditas hanya diwakili oleh *Short Term Mismatch* (STM), *Short Term Mismatch Plus* (STMP).

4.2.4.6 Tingkat Kesehatan Finansial BMI dan BSM Kumulatif

Secara keseluruhan dalam periode tahun 2003-2007, tingkat kesehatan finansial BMI lebih baik dari BSM. Secara rata-rata dari periode tersebut tingkat kesehatan finansial BMI mendapatkan nilai kredit setelah pembobotan kumulatif sebesar 77,25. Nilai tersebut lebih tinggi 6,15 dari nilai kesehatan finansial BSM yang hanya sebesar

71,10. Meski demikian keduanya secara rata-rata dalam kondisi yang Cukup Sehat. Tingkat kesehatan finansial BMI tersebut merupakan nilai kumulatif kontribusi dari aspek kualitas aset 54,60, rentabilitas 10,65, dan likuiditas 12,00. Sedangkan nilai kumulatif bagi BSM berasal dari sumber kualitas aset sebesar 50,40, rentabilitas 8,40, dan likuiditas 12,30. Dari sini dapat dilihat bahwa BMI memiliki aspek kualitas aset dan rentabilitas yang lebih baik dari BSM, masing-masing berpaut 4,20 dan 2,12. Sedangkan nilai skor likuiditas BSM lebih baik berselisih 0,30 dari likuiditas BMI (Lihat Tabel 4.27 dan 4.28).

Dari Grafik 4.22 juga terlihat bahwa nilai kesehatan finansial BSM hanya lebih baik dengan BMI pada tahun 2003. Selebihnya semenjak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 kesehatan finansial BMI lebih baik dibandingkan dengan BSM. Tren selisih skornya juga semakin meningkat. Dimana tahun 2004 nilainya hanya berpaut 1,50, tahun 2005 meningkat menjadi 3,75, tahun 2005 semakin tinggi menjadi 10,75 dan tahun 2007 menjadi semakin lebar berselisih 16,25.

Grafik 4.12 Komparasi Tingkat Kesehatan BMI dan BSM Tahun 2003-2007
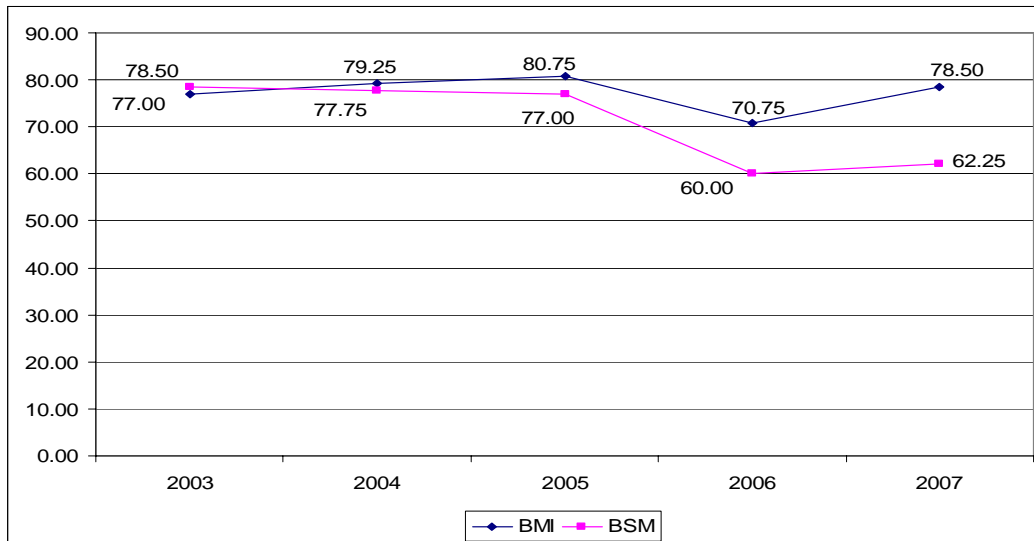
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

Tabel 4.27 Hasil Perhitungan Kesehatan Finansial BMI Tahun 2003-2007

Komponen Finansial		2003	2004	2005	2006	2007	Rata-Rata	Angka Kredit	Bobot	Nilai Bobot
1	**Kualitas Aset**									
a.	Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	2	2	2	2	2	2.00	80	35.00%	28.00
b.	Besarnya Pembiayaan Non Performing (NPF)	2	2	2	3	2	2.20	76	35.00%	26.60
	Nilai Terbobot KAP								70.00%	54.60
2	**Rentabilitas**									
a.	Net operating margin (NOM)	5	5	4	4	4	4.40	32	3.75%	1.20
b.	Return on assets (ROA)	3	2	1	1	1	1.60	88	3.75%	3.30
c.	Rasio efisiensi operasional (REO)	5	5	1	1	2	2.80	64	3.75%	2.40
d.	Diversifikasi Pendapatan (DP)	1	1	1	1	1	1.00	100	3.75%	3.75
	Nilai Terbobot Rentabilitas								15.00%	10.65
3	**Likuiditas**									
a.	Short Term Mismatch (STM)	2	1	2	3	2	2.00	80	7.50%	6.00
b.	Short Term Mismatch Plus (STMP)	1	1	2	3	3	2.00	80	7.50%	6.00
	Nilai Terbobot Likuiditas								15.00%	12.00
	Nilai Kesehatan Finansial									77.25

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI, 2003-2007.

Tabel 4.28 Hasil Perhitungan Kesehatan Finansial BSM Tahun 2003-2007

Komponen Finansial	2003	2004	2005	2006	2007	Rata-Rata	Angka Kredit	Bobot	Nilai Bobot
1 Kualitas Aset									
a. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	2	2	2	3	3	2.40	72	35.00%	25.20
b. Besarnya Pembiayaan Non Performing (NPF)	2	2	2	3	3	2.40	72	35.00%	25.20
Nilai Terbobot KAP								70.00%	50.40
2 Rentabilitas									
a. Net operating margin (NOM)	5	5	5	5	5	5.00	20	3.75%	0.75
b. Return on assets (ROA)	3	1	1	3	2	2.00	80	3.75%	3.00
c. Rasio efisiensi operasional (REO)	5	4	5	5	5	4.80	24	3.75%	0.90
d. Diversifikasi Pendapatan (DP)	1	1	1	1	1	1.00	100	3.75%	3.75
Nilai Terbobot Rentabilitas								15.00%	8.40
3 Likuiditas									
a. Short Term Mismatch (STM)	1	1	2	2	1	1.40	92	7.50%	6.90
b. Short Term Mismatch Plus (STMP)	1	3	2	3	3	2.40	72	7.50%	5.40
Nilai Terbobot Likuiditas								15.00%	12.30
Nilai Kesehatan Finansial									71.10

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BSM, 2003-2007.

3.2. Kinerja Sosial BMI dan BSM

Pada bagian ini akan dideskripsikan hasil perhitungan dan analisis kinerja sosial BMI dan BSM yang mencakup: Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE), Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM), Kontribusi Untuk *Stakeholder* (KUS), Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR) serta Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE). Setelah masing-masing bagian dianalisis, kemudian dilanjutkan dengan analisis tingkat kinerja sosial tahunan yang merupakan kumulatif dari seluruh komponen untuk setiap tahun serta rata-rata dalam lima tahun.

3.2.1 Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE)

Penilaian kuantitatif aspek Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE) BMI dan BSM dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap empat rasio penting yang mencakup aspek Intensitas Pembiayaan *Profit Sharing* (MMR), Intensitas Fungsi *Agency* (AR), Kontribusi Pembangunan Jangka Panjang (KPJP), dan Pendalaman Fungsi *Agency* (PFA).

3.2.1.1 Intensitas Pembiayaan *Profit Sharing* (MMR)

Melalui hasil penghitungan Rasio Intensitas Pembiayaan *Profit Sharing* atau *Mudharabah-Musyarakah Ratio* (MMR) ini dapat diketahui besarnya fungsi intermediasi bank syariah melalui penyaluran dana dengan akad *profit sharing*. Sebagaimana menurut Samad & Hasan (2000) sebelumnya, semakin tinggi rasio pembiayaan ini menunjukkan komitmen BMI dan BSM kepada pembangunan komunitas yang lebih tinggi. Nilai rasio ini dihitung dengan membagi jumlah pembiayan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan total pembiayaan.

Dari Grafik 4.23 menunjukkan bahwa kontribusi BMI untuk pengembangan sektor usaha dan pembangunan ekonomi umat lebih baik dari BSM, dilihat dari MMR. Nilai rata-rata MMR BMI pada periode tahun 2003-2007 adalah sebesar 44,39% lebih tinggi 16,55% dari nilai rata-rata MMR BSM yang hanya 27,85%. Nilai MMR BMI terendah adalah sebesar 34,81% terjadi pada tahun 2003 dan tertinggi sebesar 47,92% terjadi pada tahun 2006. Sedangkan nilai MMR BSM terendah sebesar 15,33% terjadi pada tahun 2003 dan tertinggi sebesar 40,55% pada tahun 2007.

Grafik 4.23 *Mudharabah-Musyarakah Ratio* (MMR) BMI dan BSM Tahun 2003-2007
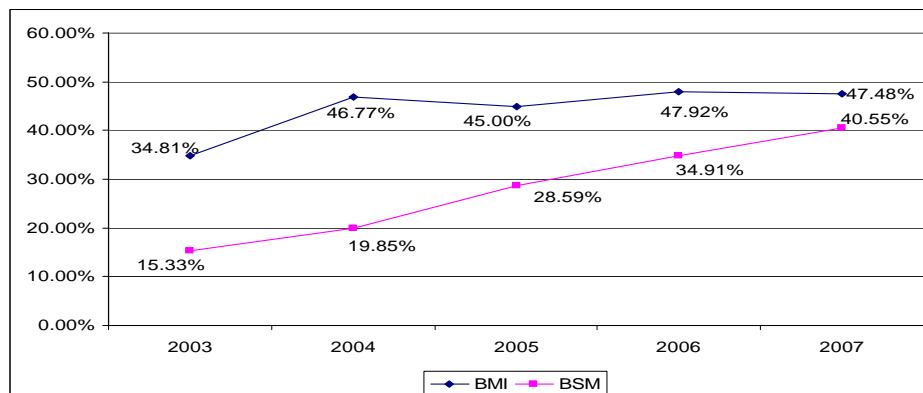
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

Sebagaimana dijelaskan dalam metodologi, kriteria penilaian peringkat untuk rasio MMR adalah sebagai berikut: Peringkat 1 = $MMR > 50\%$; Peringkat 2 = $40\% < MMR \leq 50\%$; Peringkat 3 = $30\% < MMR \leq 40\%$; Peringkat 4 = $20\% < MMR \leq 30\%$; dan Peringkat 5 = $MMR \leq 20\%$. Maka dengan demikian tahun 2003, MMR BMI berada pada peringkat 3, sedangka untuk tahun 2004-2007 berada pada peringkat 2. Sedangkan MMR BSM tahun 2003 dan 2004 berada pada peringkat 5, tahun 2005 pada peringkat 4, tahun 2006 pada peringkat 3, dan tahun 2007 pada peringkat 2.

3.2.1.2 Intensitas Fungsi *Agency* (AR)

Rasio Intensitas Fungsi *Agency* (AR) digunakan untuk mengukur besarnya fungsi *agency* BMI dan BSM dalam menghimpun dana investasi masyarakat. Semakin besar AR lebih baik, dan menunjukkan keberhasilan peran BMI dan BSM dalam mendorong masyarakat untuk berinvestasi. Selain itu semakin besar AR bagi BMI dan BSM maka biaya sistemik saat likuidasi semakin kecil, sehingga kebutuhan *financial safety net* juga turun. Dana investasi masyarakat ini mencakup DPK yang dihimpun dari tabungan dan deposito *mudharabah* yang menggunakan metode bagi hasil (*profit sharing*) atau yang juga dikenal dengan Investasi Tidak Terikat (ITT). Untuk menghasilkan nilai dari rasio AR ini, DPK *profit sharing* dibagi dengan DPK total.

Nilai rata-rata AR BMI pada periode tahun 2003-2007 adalah sebesar 92,56% lebih tinggi 10,19% dari nilai rata-rata AR BSM yang hanya 82,37%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi BMI dalam mendorong masyarakat untuk berinvestasi lebih tinggi dari BSM. Nilai AR BMI tertinggi adalah sebesar 97,54% terjadi pada tahun 2005 dan terendah sebesar 90,30% terjadi pada tahun 2004. Sedangkan nilai AR BSM terendah sebesar 74,95% terjadi pada tahun 2006 dan tertinggi sebesar 88,67% pada tahun 2003. Pada keseluruhan tahun AR BMI lebih baik dari BSM.

Grafik 4.24 Rasio Intensitas Fungsi *Agency* (AR) BMI dan BSM
Tahun 2003-2007
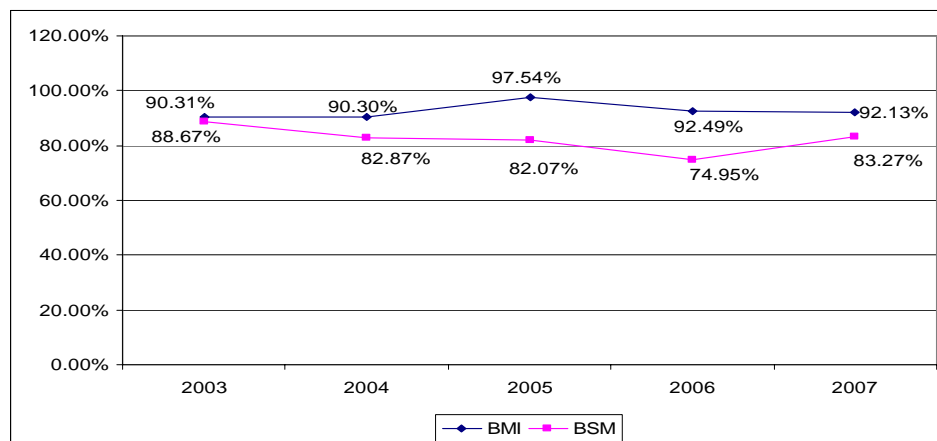
	2003	2004	2005	2006	2007
BMI	90.31%	90.30%	97.54%	92.49%	92.13%
BSM	88.67%	82.87%	82.07%	74.95%	83.27%

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa AR BMI dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 seluruhnya berada pada peringkat 1. Sedangkan AR BSM kecuali tahun 2006 yang berada pada peringkat 3, selebihnya berada pada peringkat 2. Hal ini mengikuti kriteria penilaian peringkat untuk rasio AR sebagai berikut: Peringkat 1

= AR > 90%; Peringkat 2 = 80% < AR ≤ 90%; Peringkat 3 = 70% < AR ≤ 80%; Peringkat 4 = 60% < AR ≤ 70%; dan Peringkat 5 = AR ≤ 60%.

3.2.1.3 Kontribusi Pembangunan Jangka Panjang (KPJP)

Rasio Kontribusi Pembangunan Jangka Panjang (KPJP) digunakan untuk mengukur besarnya pembiayaan BMI dan BSM yang berjangka waktu diatas 5 tahun. Pembiayaan ini mencakup baik Piutang Murabahah, Pembiayaan Qard, Mudharabah, Musyarakah, dan juga Aktiva Ijarah. Untuk menghasilkan nilai dari rasio KPJP ini, pembiayaan berjangka waktu diatas 5 tahun dibagi dengan total aset yang dimiliki BMI dan BSM. Semakin besar rasio KPJP menunjukkan peran yang semakin baik dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, demikian juga sebaliknya.

Nilai rata-rata rasio KPJP BMI pada periode tahun 2003-2007 adalah sebesar 8,69%. Nilai ini lebih tinggi 1,84% dari nilai rata-rata rasio KPJP BSM yang bernilai 6,85%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi BMI pembiayaan jangka panjang untuk menopang pembangunan ekonomi nasional sedikit lebih tinggi dari BSM. Nilai rasio KPJP BMI tertinggi adalah sebesar 11,85% terjadi pada tahun 2007 dan terendah sebesar 5,65% terjadi pada tahun 2006. Sedangkan nilai rasio KPJP BSM terendah sebesar 4,62% terjadi pada tahun 2006 dan tertinggi sebesar 9,37% pada tahun 2005. Nilai rasio KPJP BSM lebih baik dari BMI terjadi pada tahun 2004 dan 2005.

Grafik 4.25 Kontribusi Pembangunan Jangka Panjang (KPJP) BMI dan BSM Tahun 2003-2007
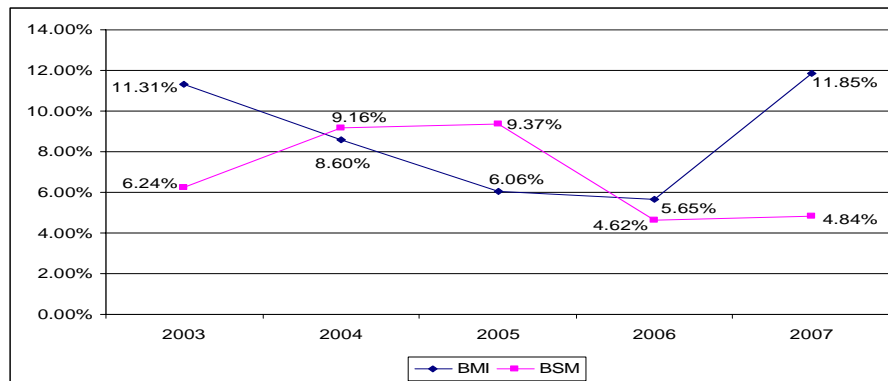
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai rasio KPJP BMI tahun 2003 berada pada peringkat 3, tahun 2004 dan 2005 peringkat 4, tahun 2006 turun menjadi peringkat 5 dan tahun 2007 membaik menjadi peringkat 3. Sedangkan nilai rasio KPJP BSM, pada tahun 2003 berada pada peringkat 4, tahun 2004 dan 2005 mendapat peringkat 3, tahun 2006 dan 2007 memburuk menjadi peringkat 5. Hal ini mengikuti kriteria penilaian peringkat untuk rasio KPJP sebagai berikut: Peringkat 1 = KPJP > 15%; Peringkat 2 = 12% < KPJP ≤ 15%; Peringkat 3 = 9% < KPJP ≤ 12%; Peringkat 4 = 6% < KPJP ≤ 9%; dan Peringkat 5 = KPJP ≤ 6%.

3.2.1.4 Pendalaman Fungsi *Agency* (PFA)

Rasio Pendalaman Fungsi *Agency* (PFA) digunakan untuk mengukur seberapa dalam fungsi agency BMI dan BSM dalam menghimpun dana investasi masyarakat. Kedalaman ini berkaitan dengan horison waktu yang dipilih oleh investor. Karena

semakin lama jangka waktu yang dipilih, juga akan memudahkan BMI dan BSM untuk menginvestasikan pada pilihan-pilihan investasi dengan waktu yang relatif panjang. Dalam rasio PFA ini komponen pentingnya adalah DPK *profit sharing* yang dihimpun dalam bentuk deposito *mudharabah* ditambahkan dengan obligasi *mudharabah* atau *musyarakah* yang dikeluarkan oleh BMI dan BSM. Deposito dan obligasi *mudharabah* dipilih karena memiliki jangka waktu yang lebih panjang, paling tidak satu bulan. Untuk menghasilkan nilai rasio PFA ini, nilai deposito dan obligasi *mudharabah* dibagi dengan total kewajiban. Semakin besar rasio PFA, akan menunjukkan semakin besar peran BMI dan BSM untuk mendorong masyarakat berinvestasi dengan horison waktu yang lebih panjang, sehingga akan dapat membiayai proyek dan bisnis jangka panjang dan memiliki dampak ekonomi yang luas.

Dari nilai rata-rata rasio PFA pada periode tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa BMI memiliki peran yang lebih besar dalam mendorong masyarakat berinvestasi dengan horison waktu yang lebih panjang. Dengan demikian potensi *mismatch* BMI akan lebih rendah sekaligus dapat membiayai proyek dan bisnis dengan jangka yang relatif lebih panjang dan memiliki dampak ekonomi yang luas. Nilai rata-rata rasio PFA BMI pada periode tersebut adalah sebesar 56,98%, lebih tinggi 4,51% dari nilai rata-rata rasio PFA BSM yang mencapai 52,47%. Nilai rasio PFA BMI tertinggi adalah sebesar 62,78% terjadi pada tahun 2005 dan terendah sebesar 49,30% terjadi pada tahun 2007. Sedangkan nilai rasio PFA BSM terendah sebesar 41,89% terjadi pada tahun 2006 dan tertinggi sebesar 61,11% pada tahun 2003. Nilai rasio PFA BSM lebih baik dari BMI terjadi pada tahun 2003, selebihnya BMI lebih baik dari BSM.

Grafik 4.26 Pendalaman Fungsi *Agency* (PFA) BMI dan BSM
Tahun 2003-2007
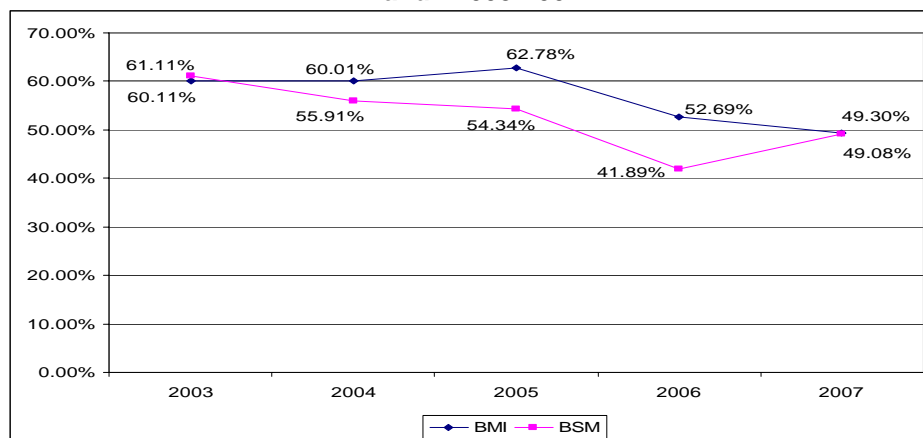
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai rasio PFA BMI tahun 2003, 2004, dan 2005 berada pada peringkat 2, tahun 2006 pada peringkat 3, dan tahun 2007 memburuk menjadi peringkat 4. Sedangkan nilai rasio PFA BSM, pada tahun 2003 berada pada peringkat 2, tahun 2004 dan 2005 mendapat peringkat 3, tahun 2006 dan 2007 turun menjadi peringkat 4. Hal ini mengikuti kriteria penilaian peringkat untuk rasio PFA sebagai berikut: Peringkat 1 = PFA > 70%; Peringkat 2 = 60% < PFA ≤ 70%; Peringkat 3 = 50% < PFA ≤ 60%; Peringkat 4 = 40% < PFA ≤ 50%; dan Peringkat 5 = PFA ≤ 40%.

3.2.2 Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM)

Penilaian kuantitatif aspek Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM) BMI dan BSM dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap empat rasio penting yang mencakup aspek Rasio Pembiayaan *Qardh* (QR), Rasio Kinerja Zakat (ZR), Rasio Pelaksanaan Fungsi Sosial (RFS), dan Rasio Pelaksanaan Fungsi Edukasi (CSR).

3.2.2.1 Pembiayaan *Qardh* (QR)

Melalui hasil penghitungan Rasio Pembiayaan *Qardh* atau *Qardh Ratio* (QR) dapat diketahui besarnya kontribusi pembiayan *qardh* BMI dan BSM bagi masyarakat. Semakin tinggi komponen ini akan mengindikasikan kepedulian BMI dan BSM yang tinggi kepada pihak yang mengalami kesulitan. QR dihitung dengan membandingkan pembiayaan *qardh* dengan total pembiayaan yang dilakukan oleh bank tersebut.

Dari Grafik 4.27 menunjukkan bahwa kepedulian BSM terhadap pihak lain atau nasabah yang mengalami kesulitan lebih baik dari BMI, dilihat dari rasio QR. Nilai rata-rata QR BSM pada periode tahun 2003-2007 adalah sebesar 3,23% lebih tinggi 2,73% dari nilai rata-rata QR BMI yang hanya 0,51%. Nilai QR BSM tertinggi adalah sebesar 5,61% terjadi pada tahun 2003 dan terendah sebesar 1,06% terjadi pada tahun 2004. Sedangkan nilai QR BMI terendah sebesar 0,06% terjadi pada tahun 2003 dan tertinggi sebesar 1,42% pada tahun 2007.

Grafik 4.27 *Qardh Ratio* (QR) BMI dan BSM
Tahun 2003-2007
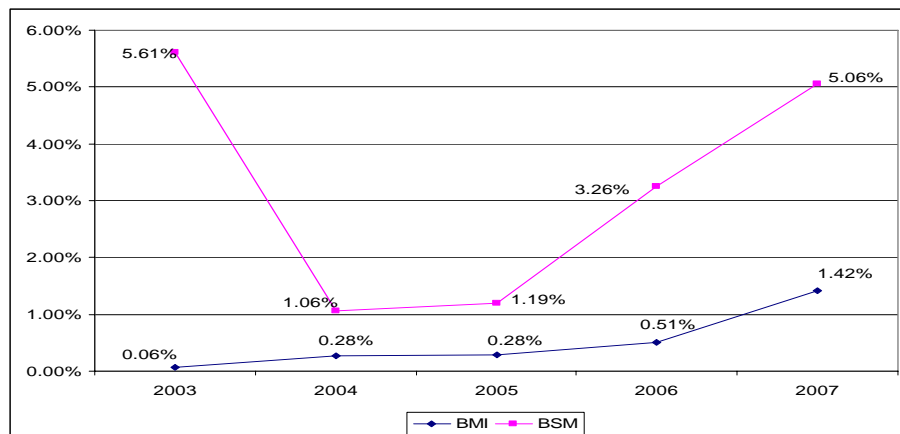
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

Sebagaimana dijelaskan dalam metodologi, kriteria penilaian peringkat untuk rasio QR adalah: Peringkat 1 = QR > 5%; Peringkat 2 = 3% < QR ≤ 5%; Peringkat 3 = 2% < QR ≤ 3%; Peringkat 4 = 1% < QR ≤ 2%; dan Peringkat 5 = QR ≤ 1%. Maka dengan demikian tahun 2003 dan 2007, QR BSM berada pada peringkat 1, sedangkan untuk tahun 2004 dan 2005 berada pada peringkat 4, serta tahun 2006 berada pada peringkat 2. Sedangkan QR BMI tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 berada pada peringkat 5, sedangkan tahun 2007 mengalami perbaikan menjadi peringkat 4.

3.2.2.2 Kinerja Zakat (ZR)

Rasio kinerja zakat atau *zakah ratio* (ZR) digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur besarnya kontribusi zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh BMI dan BSM. Zakat tersebut kemudian akan dapat dinikmati oleh *mustahiq* zakat, yang merepresentasi kelompok yang membutuhkan dalam masyarakat. ZR diperoleh dengan membandingkan zakat yang dibayarkan BMI dan BSM dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi komponen ini akan mengindikasikan *zakah performance* masing-masing bank syariah tersebut.

Dari nilai rata-rata ZR pada periode tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa BMI memberikan kontribusi zakat perusahaan yang lebih besar. Nilai rata-rata ZR BMI pada periode tersebut adalah sebesar 1,73%, lebih tinggi 0,67% dari nilai rata-rata ZR BSM yang mencapai 1,06%. Nilai ZR BMI tertinggi adalah sebesar 3,18% terjadi pada tahun 2007 dan terendah sebesar 0,00% terjadi pada tahun 2003. Sedangkan nilai ZR BSM terendah sebesar juga 0,00% terjadi pada tahun 2003 dan tertinggi sebesar 2,19% pada tahun 2006.

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai ZR BMI tahun 2003 berada pada peringkat 5, tahun 2004 peringkat 4, tahun2005 berada pada peringkat 3, tahun 2006 pada peringkat 2, dan tahun 2007 meningkat menjadi peringkat 1. Sedangkan nilai ZR BSM pada tahun 2003 dan 2004 berada pada peringkat 5, tahun 2005 mendapat peringkat 3, tahun 2006 peringkat 2, dan tahun 2007 memburuk menjadi peringkat 5. Adapun kriteria penilaian peringkat untuk ZR yang digunakan adalah: Peringkat 1 = ZR > 2,5%; Peringkat 2 = 2% < ZR ≤ 2,5%; Peringkat 3 = 1,5% < ZR ≤ 2%; Peringkat 4 = 1% < ZR ≤ 1,5%; dan Peringkat 5 = ZR ≤ 1%.

Grafik 4.28 *Zakah Ratio* (ZR) BMI dan BSM
Tahun 2003-2007
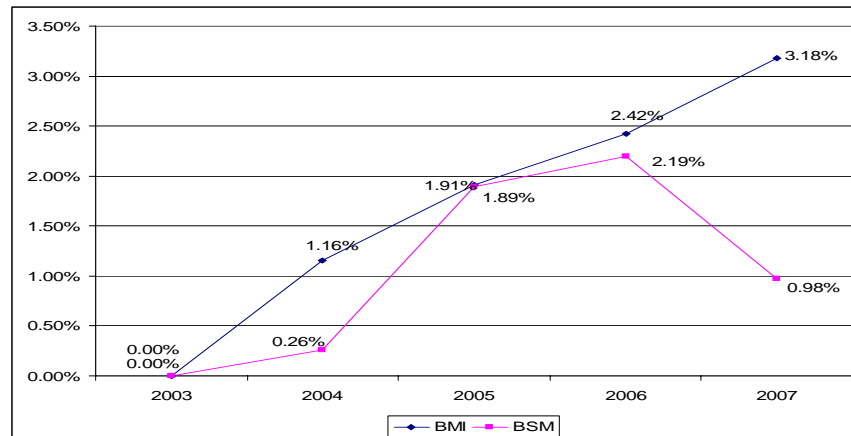
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

3.2.2.3 Pelaksanaan Fungsi Sosial (RFS)

Melalui hasil perhitungan Rasio Pelaksanaan Fungsi Sosial (RFS) dapat diukur manfaat yang diberikan oleh BMI dan BSM bagai masyarakat secara total dari zakat dan pembiayan kebajikan (*qard*). Nilai RFS didapatkan dengan membandingkan pembiayan *qardh* ditambahkan dengan pembayaran zakat perusahaan dengan modal inti atau total

ekuitas. Menurut BI (2007), semakin tinggi komponen ini mengindikasikan pelaksanaan fungsi sosial bank syariah semakin tinggi.

Dari Grafik 4.29 menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi sosial BSM melalui zakat dan pembiayaan *qardh* lebih baik dari BMI, dilihat dari rasio RFS. Nilai rata-rata rasio RFS BSM pada periode tahun 2003-2007 adalah sebesar 29,66% lebih tinggi 24,31% dari nilai rata-rata RFS BMI yang hanya 5,35%. Nilai RFS BSM tertinggi adalah sebesar 64,58% terjadi pada tahun 2007 dan terendah sebesar 10,30% terjadi pada tahun 2004. Sedangkan nilai RFS BMI terendah sebesar 0,46% terjadi pada tahun 2003 dan tertinggi sebesar 15,22% pada tahun 2007.

Grafik 4.29 Rasio Pelaksanaan Fungsi Sosial (RFS) BMI dan BSM Tahun 2003-2007
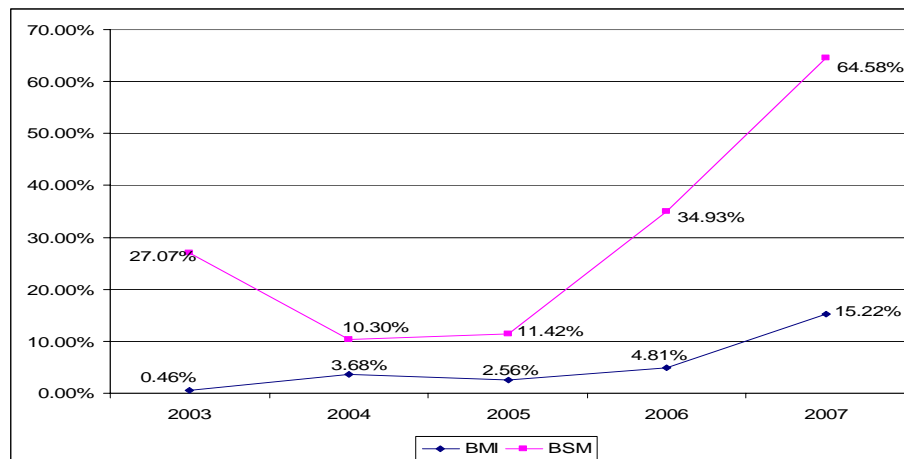
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

Sebagaimana dijelaskan dalam metodologi, kriteria penilaian peringkat untuk RFS adalah: Peringkat 1 = RFS > 20%; Peringkat 2 = 15% < RFS ≤ 20%; Peringkat 3 = 10% < RFS ≤ 15%; Peringkat 4 = 5% < RFS ≤ 10%; dan Peringkat 5 = RFS ≤ 5%. Maka dengan demikian tahun 2003, 2006 dan 2007, RFS BSM berada pada peringkat 1, sedangkan untuk tahun 2004 dan 2005 berada pada peringkat 3. Sedangkan RFS BMI tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 berada pada peringkat 5, sedangkan tahun 2007 mengalami perbaikan signifikan menjadi peringkat 2.

3.2.2.4 Pelaksanaan Fungsi Edukasi (CSR)

Rasio pelaksanaan fungsi edukasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur besar fungsi *corporate social reponsibility (CSR)* dalam proses pembelajaran masyarakat yang telah dijalankan BMI dan BSM. Rasio CSR dihitung dengan membandingkan biaya edukasi publik dengan total biaya operasional. Biaya edukasi publik dicerminkan oleh biaya promosi. Sebagaimana menurut BI (2007), semakin tinggi rasio CSR ini menunjukkan semakin besar peran bank syariah tersebut dalam proses pembelajaran masyarakat.

Dari nilai rata-rata rasio CSR pada periode tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa BMI memberikan kontribusi edukasi publik yang lebih besar. Nilai rata-rata rasio CSR BMI pada periode tersebut adalah sebesar 7,06%, lebih tinggi 2,69% dari nilai rata-rata rasio CSR BSM yang mencapai 4,37%. Nilai rasio CSR BMI tertinggi adalah sebesar

7,33% terjadi pada tahun 2004 dan terendah sebesar 6,79% terjadi pada tahun 2007. Sedangkan nilai rasio CSR BSM terendah sebesar 2,46% terjadi pada tahun 2006 dan tertinggi sebesar 6,17% pada tahun 2003. Secara keseluruhan rasio kontribusi edukasi publik BMI pada setiap tahun lebih baik dari BSM.

Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai rasio CSR BMI tahun 2003 dan 2007 berada pada peringkat 2, sedangkan tahun 2004, 2005 dan 2006 pada peringkat 1. Sedangkan nilai rasio CSR BSM pada tahun 2003 dan 2004 berada pada peringkat 2, tahun 2005 dan 2007 peringkat 3, dan tahun 2006 mendapat peringkat 4. Adapun kriteria penilaian peringkat untuk rasio kontribusi edukasi publik yang digunakan adalah: Peringkat 1 = CSR > 7%; Peringkat 2 = 5% < CSR ≤ 7%; Peringkat 3 = 3% < CSR ≤ 5%; Peringkat 4 = 2% < CSR ≤ 3%; dan Peringkat 5 = CSR ≤ 2%.

Grafik 4.30 Rasio Pelaksanaan Fungsi Edukasi (CSR) BMI dan BSM Tahun 2003-2007
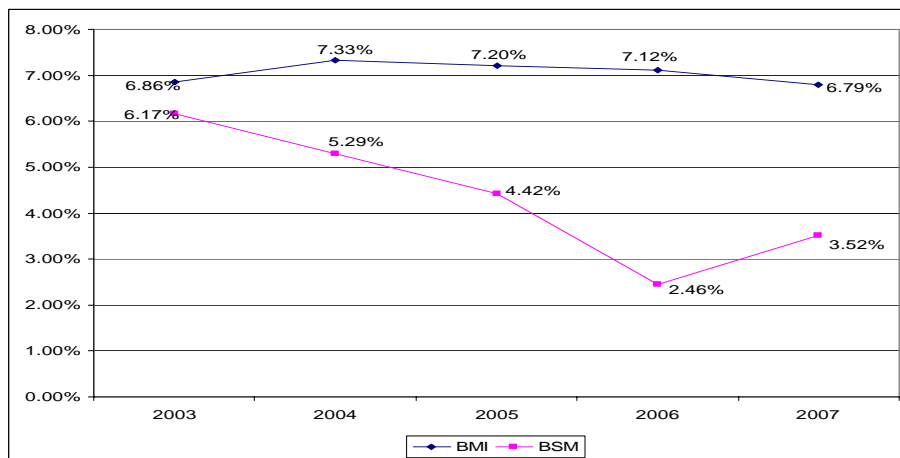
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

3.2.3 Kontribusi Untuk *Stakeholder* (KUS)

Penilaian kuantitatif aspek Kontribusi Untuk Stakeholder (KUS) BMI dan BSM dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap lima rasio yang mencakup aspek Rasio Kontribusi terhadap Kesejahteraan *Sohibul Maal* (KSM), Kesejahteraan *Mudharib* (KM), Kesejahteraan Investor (KI), Kesejahteraan Pemegang *Wadiah* (KPW), dan Kontribusi Pajak untuk Pemerintah (KPP).

3.2.3.1 Kontribusi Untuk Kesejahteraan *Sohibul Maal* (KSM)

Melalui hasil penghitungan rasio kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan *Sohibul Maal* (KSM) dapat diketahui besarnya keuntungan BMI dan BSM yang dinikmati oleh *Sohibul Maal* (Pemegang Saham) berupa peningkatan kekayaan mereka melalui peningkatan nilai perusahaan. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kontribusi BMI dan BSM terhadap peningkatan kesejahteraan *Sohibul Maal* yang baik. Rasio KSM dihitung dengan membandingkan Laba Setelah Pajak dengan Modal Inti atau Total Ekuitas dari BMI dan BSM.

Dari Grafik 4.31 menunjukkan bahwa kontribusi BMI terhadap peningkatan kesejahteraan Pemegang Saham (*Sohibul Maal*) dalam periode tahun 2003-2007, lebih tinggi dari BSM. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio KSM rata-rata dalam periode

tersebut dimana BMI mendapatkan nilai 13,48% sedangkan nilai BSM adalah 11,85%, lebih rendah 1,63%. Nilai rasio KSM BMI tertinggi adalah sebesar 17,18% terjadi pada tahun 2007 dan terendah sebesar 7,54% terjadi pada tahun 2003. Sedangkan nilai rasio KSM BSM terendah sebesar 3,52% terjadi pada tahun 2003 dan tertinggi sebesar 18,85% pada tahun 2004. Nilai rasio KSM BSM lebih tinggi dari BMI terjadi pada tahun 2004 tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam metodologi, kriteria penilaian peringkat untuk rasio KSM adalah: Peringkat 1 = KSM > 15%; Peringkat 2 = 12% < KSM ≤ 15%; Peringkat 3 = 9% < KSM ≤ 12%; Peringkat 4 = 6% < KSM ≤ 9%; dan Peringkat 5 = KSM ≤ 6%. Maka dengan demikian rasio KSM BMI pada tahun 2003 mendapat peringkat 4, sedangkan untuk tahun 2004, 2005 dan 2006 mengalami perbaikan peringkat sehingga berada pada peringkat 2, serta tahun 2007 meningkat kembali berada pada peringkat 1. Sedangkan rasio KSM BSM tahun 2003 mendapat peringkat 5, tahun 2004 peringkat 1, tahun 2005 dan 2007 berada pada peringkat 2, sedangkan tahun 2006 mendapat peringkat 3.

Grafik 4.31 Kontribusi Untuk Kesejahteraan *Sohibul Maal* (KSM) BMI dan BSM Tahun 2003-2007
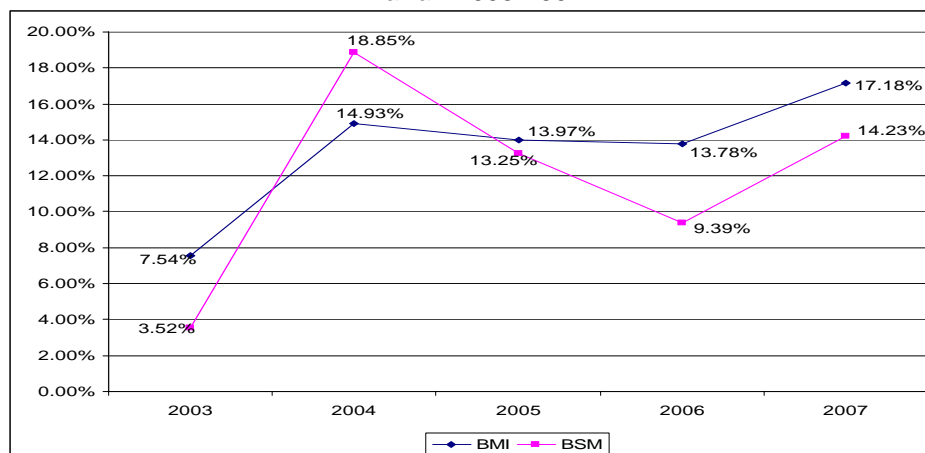
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

3.2.3.2 Alokasi Kesejahteraan *Mudharib* (KM)

Rasio Alokasi Kesejahteraan *Mudharib* (KM) dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur besarnya proporsi alokasi pendapatan operasional BMI dan BSM yang dinikmati oleh manajemen dan pegawai (*mudharib*) dalam bentuk gaji dan tunjangan lainnya. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan alokasi dari BMI dan BSM untuk kesejahteraan *Mudharib* yang lebih baik. Rasio KM dihitung dengan membandingkan Biaya Gaji dan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai dengan Pendapatan Operasional.

Dari nilai rata-rata rasio KM pada periode tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa BSM memberikan alokasi untuk Kesejahteraan *Mudharib* yang lebih besar. Nilai rata-rata rasio KSM BSM pada periode tersebut adalah sebesar 13,82%, lebih tinggi 0,33% dari nilai rata-rata rasio KM BMI yang mencapai 13,48%. Nilai rasio KM BMI tertinggi adalah sebesar 17,00% terjadi pada tahun 2004 dan terendah sebesar 11,24% terjadi pada tahun 2006. Sedangkan nilai rasio KM BSM terendah sebesar 11,81% terjadi pada tahun 2004 dan tertinggi sebesar 15,15% pada tahun 2007. Secara keseluruhan rasio alokasi

kesejahteraan *Mudharib* BSM pada setiap tahun lebih tinggi dari BMI, kecuali pada tahun 2004 (lihat Grafik 4.32).

Grafik 4.32 Alokasi Kesejahteraan *Mudharib* (KM) BMI dan BSM Tahun 2003-2007
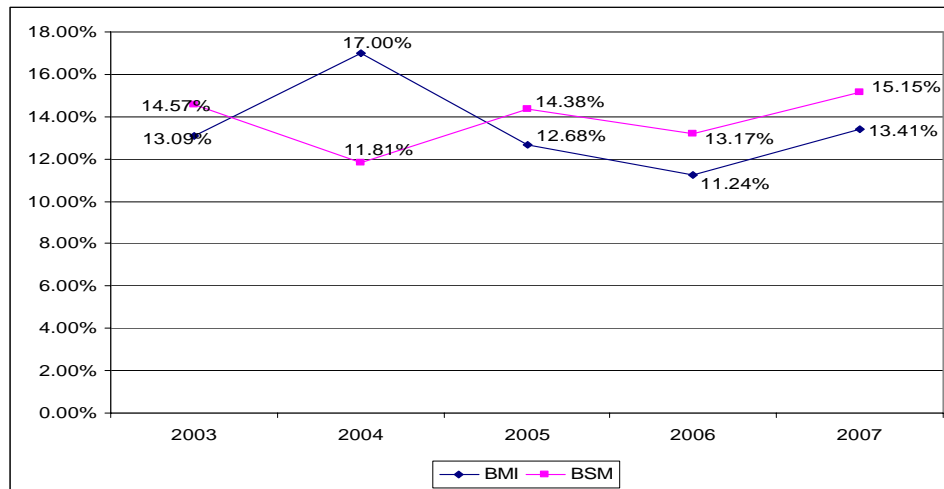
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai rasio KM BMI tahun 2003, 2005 dan 2007 berada pada peringkat 2. Peringkat terendah adalah 3 terjadi pada tahun 2006, dan tertinggi pada peringkat 1 dicapai tahun 2004. Sedangkan nilai rasio KM BSM pada tahun 2003 dan 2004 masing-masing berada pada peringkat 2 dan 3. Tahun 2005 dan 2006 mengalami perbaikan sehingga kembali ke peringkat 2, dan tahun 2007 semakin meningkat sehingga mendapat peringkat 1. Adapun kriteria penilaian peringkat untuk rasio alokasi kesejahteraan *Mudharib* yang digunakan adalah: Peringkat 1 = KM > 15%; Peringkat 2 = 12% < KM ≤ 15%; Peringkat 3 = 9% < KM ≤ 12%; Peringkat 4 = 6% < KM ≤ 9%; dan Peringkat 5 = KM ≤ 6%.

3.2.3.3 Kontribusi Atas Kesejahteraan Investor (KI)

Melalui hasil penghitungan rasio kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan Investor (KI) ini dapat diketahui besarnya keuntungan BMI dan BSM yang dinikmati oleh Pemilik Rekening Tabungan dan Deposito *Mudharabah,* berupa bagi hasil yang diterima. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kontribusi BMI dan BSM atas peningkatan kesejahteraan Investor yang semakin baik. Rasio KI dihitung dengan membandingkan Distribusi Bagi Hasil yang telah dibayarkan oleh BMI dan BSM dengan Total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berbentuk Investasi Tidak Terikat (*Mudharabah Muthlaqoh).*

Dari nilai rata-rata rasio KI pada periode tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa BMI memberikan keuntungan untuk Investor yang lebih besar. Nilai rata-rata rasio KI BMI pada periode tersebut adalah sebesar 7,26%, lebih tinggi 0,93% dari nilai rata-rata rasio KI BSM yang mencapai 6,33%. Nilai rasio KI BMI tertinggi adalah sebesar 9,01% terjadi pada tahun 2006 dan terendah sebesar 6,25% terjadi pada tahun 2007. Sedangkan nilai rasio KI BSM terendah sebesar 5,53% juga terjadi pada tahun 2007 dan tertinggi sebesar 7,39% pada tahun 2006. Secara keseluruhan rasio KI BMI pada setiap tahun lebih tinggi dari BSM.

Sebagaimana dijelaskan dalam metodologi, kriteria penilaian peringkat untuk rasio KI adalah: Peringkat 1 = KI > 8%; Peringkat 2 = 6% < KI ≤ 8%; Peringkat 3 = 4% < KI ≤ 6%; Peringkat 4 = 2% < KI ≤ 4%; dan Peringkat 5 = KI ≤ 2%. Maka dengan demikian rasio KI BMI pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2007 berada pada peringkat 2, sedangkan tahun 2006 meraih peringkat terbaik yaitu pada peringkat 1. Sedangkan rasio KI BSM tahun 2003, 2005, dan 2006 mendapat peringkat 2, sedangkan tahun 2004 dan 2007 mendapat peringkat 3.

Grafik 4.33 Kontribusi Atas Kesejahteraan Investor (KI) BMI dan BSM Tahun 2003-2007
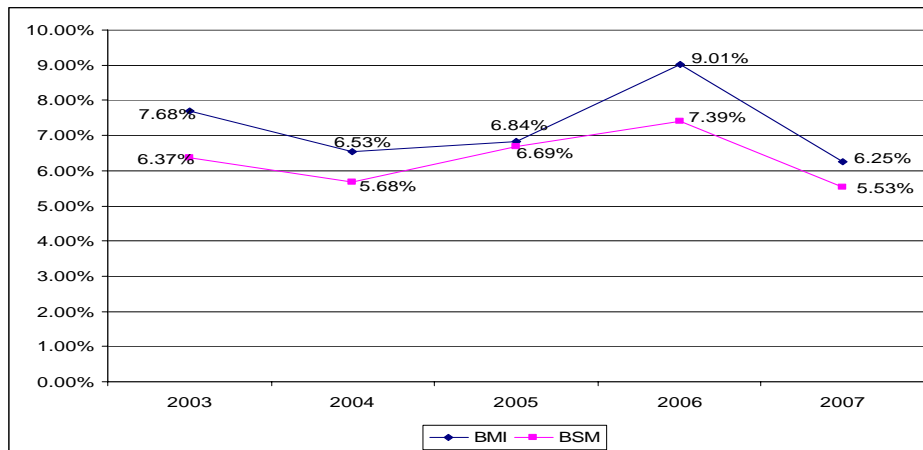
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

3.2.3.4 Kontribusi Untuk Kesejahteraan Pemegang *Wadiah* (KPW)

Melalui hasil penghitungan rasio kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan Pemegang Rekening *Wadiah* (KPW) dapat diketahui besarnya keuntungan BMI dan BSM yang dinikmati oleh Pemilik Rekening Giro dan Tabungan *Wadiah,* berupa bonus yang diterima. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kontribusi BMI dan BSM atas peningkatan kesejahteraan Pemegang Rekening *Wadiah* yang baik. Rasio KPW dihitung dengan membandingkan Bonus yang telah dibayarkan dengan Total Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk *Wadiah.*

Dari Grafik 4.31 menunjukkan bahwa kontribusi BSM terhadap peningkatan Pemegang Rekening *Wadiah* (KPW) dalam periode tahun 2003-2007, lebih tinggi dari BMI. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio KPW rata-rata dalam periode tersebut dimana BSM mendapatkan nilai 0,94% sedangkan nilai BMI adalah 0,54%, lebih rendah 0,40%. Nilai rasio KPW BSM tertinggi adalah sebesar 1,29% terjadi pada tahun 2003 dan terendah sebesar 0,62% terjadi pada tahun 2004. Sedangkan nilai rasio KPW BMI terendah sebesar 0,16% terjadi pada tahun 2004 dan tertinggi sebesar 0,94% pada tahun 2003. Nilai rasio KPW BSM untuk setiap tahun pada periode tersebut lebih tinggi dari BMI.

Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai rasio KPW BMI tahun 2003, berada pada peringkat 3, peringkat terendah adalah 5 terjadi pada tahun 2004 dan 2006, sedangkan tahun 2005 dan 2007 berada pada peringkat 4. Sedangkan nilai rasio KPW BSM berada pada peringkat terbaik 2 pada tahun 2003, berikutnya peringkat 3 pada tahun 2005 dan 2007, dan peringkat terendah 4 terjadi pada tahun 2004 dan 2006.

Adapun kriteria penilaian peringkat yang digunakan untuk rasio KPW ini adalah: Peringkat 1 = KPW > 1,5%; Peringkat 2 = 1,2% < KPW ≤ 1,5%; Peringkat 3 = 0,9% < KPW ≤ 1,2%; Peringkat 4 = 0,6% < KPW ≤ 0,9%; dan Peringkat 5 = KPW ≤ 0,6%.

Grafik 4.34 Kontribusi Untuk Kesejahteraan Pemegang *Wadiah* (KPW) BMI dan BSM Tahun 2003-2007
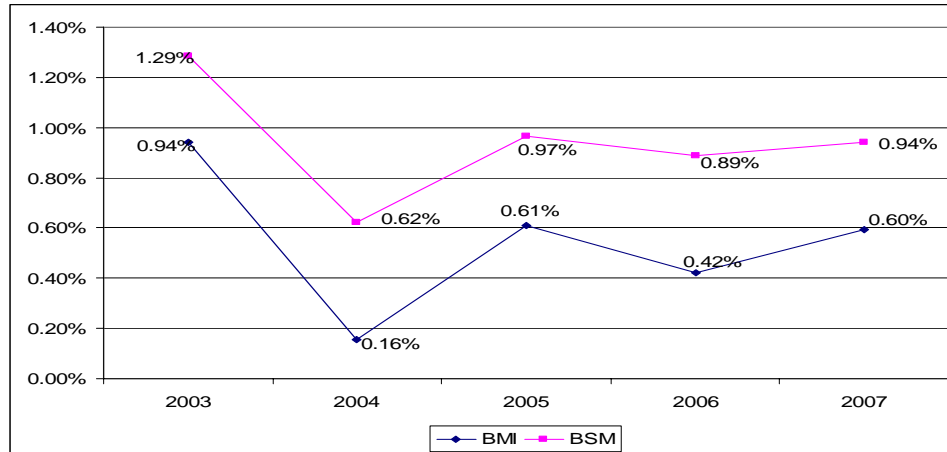
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

3.2.3.5 Kontribusi Pajak untuk Pemerintah (KPP)

Rasio kontribusi pajak untuk pemerintah (KPP) dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi pembayaran pajak BMI dan BSM yang diterima oleh Pemerintah dari skala aktivitas operasionalnya. Pajak yang diterima sangat penting karena kemudian digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas pemerintah, belanja pembangunan, dan tranfer subsidi kepada masyarakat. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kontribusi BMI dan BSM untuk penyelenggaraan pemerintah yang semakin baik. Rasio KPP dihitung dengan membandingkan Beban Pajak Penghasilan Bersih dengan Pendapatan Operasional BMI dan BSM.

Dari nilai rata-rata rasio KPP pada periode tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa BMI memberikan proporsi kontribusi pajak kepada pemerintah yang sedikit lebih besar dibanding dengan BSM, dengan perbedaan 0,10%. Nilai rata-rata rasio KPP BSM pada periode tersebut adalah sebesar 4,97%, sedangkan nilai rata-rata rasio KPP BMI mencapai 5,06%. Nilai rasio KPP BMI tertinggi adalah sebesar 6,32% terjadi pada tahun 2005 dan terendah sebesar 3,49% terjadi pada tahun 2003. Sedangkan nilai rasio KPP BSM terendah sebesar 3,10% terjadi pada tahun 2003 dan tertinggi sebesar 8,04% pada tahun 2004. Secara keseluruhan rasio KPP BMI pada setiap tahun lebih tinggi dari BSM, kecuali pada tahun 2004.

Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa peringkat dari nilai rasio KPP BMI mengalami trend yang membaik. Dimana tahun 2003 dan 2004 masing-masing memperoleh peringkat 4 dan 3, berikutnya tahun 2005, 2006 dan 2007 meningkat shingga memperoleh peringkat 2. Sedangkan nilai rasio KPP BSM pada tahun 2003 dan 2006 berada dititik terendah pada peringkat 4. Peringkat terbaik 1 diperoleh tahun 2004, sedangkan tahun 2005 dan 2007 masing-masing pada peringkat 2 dan 3. Adapun kriteria penilaian peringkat untuk rasio kontribusi pajak untuk pemerintah yang digunakan

adalah: Peringkat 1 = KPP > 7%; Peringkat 2 = 5% < KPP ≤ 7%; Peringkat 3 = 4% < KPP ≤ 5%; Peringkat 4 = 3% < KPP ≤ 4%; dan Peringkat 5 = KPP ≤ 3%.

Grafik 4.35 Kontribusi Pajak untuk Pemerintah (KPP) BMI dan BSM Tahun 2003-2007
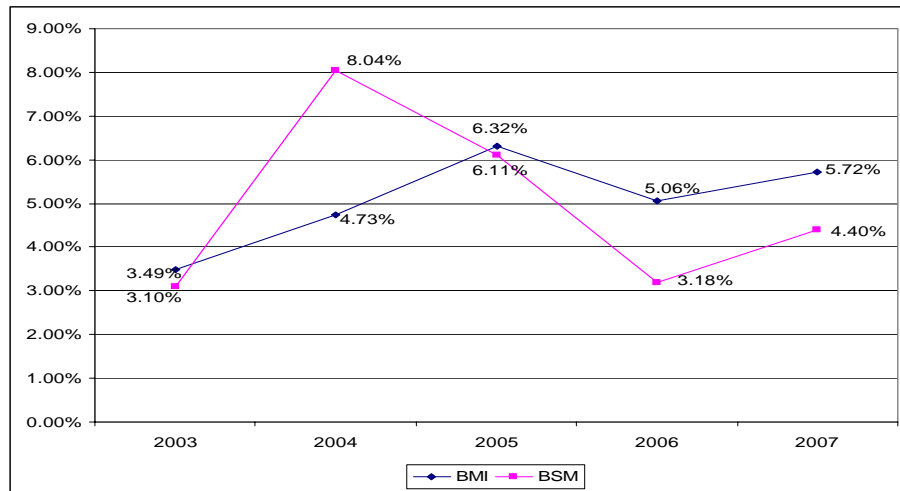
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

3.2.4 Kontribusi Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR)

Penilaian kuantitatif aspek Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR) BMI dan BSM dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap dua rasio penting yang mencakup aspek alokasi anggaran untuk Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (P4) dan Riset serta Pengembangan (R&D).

3.2.4.1 Alokasi Untuk Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (P4)

Melalui hasil penghitungan rasio alokasi anggaran untuk peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai (P4) ini dapat diketahui besarnya alokasi dana untuk program pendidikan dan pelatihan pegawai. Sebagai institusi jasa peningkatan kapasitas SDI bagi BMI dan BSM sangat penting, karena jantung penciptaan layanan yang berkualitas adalah dari kualitas SDI yang dimiliki. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan alokasi anggaran bank syariah untuk peningkatan kualitas SDI-nya yang baik. Rasio PKSR dihitung dengan membandingkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan yang tercermin dalam Biaya Pendidikan dan Pelatihan dengan Laba Setelah Pajak.

Data dari Grafik 4.36 menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai (P4) BSM dalam periode tahun 2003-2007, lebih baik dari BMI. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio P4 rata-rata dalam periode tersebut dimana BMI mendapatkan nilai 7,57%, lebih rendah 5,32% dari nilai BSM yang mencapai 12,89%. Nilai rasio P4 BMI tertinggi adalah sebesar 9,34% terjadi pada tahun 2006 dan terendah sebesar 3,87% terjadi pada tahun 2007. Sedangkan nilai rasio P4 BSM terendah sebesar 4,59% terjadi pada tahun 2004 dan tertinggi sebesar 24,31% pada tahun 2003. Nilai rasio P4 BMI lebih tinggi dari BSM haya terjadi pada tahun 2004.

Sebagaimana dijelaskan dalam metodologi, kriteria penilaian peringkat untuk rasio PKSR adalah: Peringkat 1 = PKSR > 15%; Peringkat 2 = 12% < PKSR ≤ 15%; Peringkat 3 = 9% < PKSR ≤ 12%; Peringkat 4 = 6% < PKSR ≤ 9%; dan Peringkat 5 =

PKSR ≤ 6%. Maka dengan demikian rasio PKSR BMI pada tahun 2003 dan 2005 berada pada peringkat 4, sedangkan tahun 2004 dan 2005 meraih peringkat 3. Sedangkan tahun 2007, BMI untuk rasio ini mengalami penurunan peringkat sehingga berada pada peringkat 5. Sedangkan rasio PKSR BSM tahun 2003 mendapat peringkat 1, tahun 2004 peringkat 5, tahun 2005 dan 2006 berada pada peringkat 2, sedangkan tahun 2007 mendapat peringkat 4.

Grafik 4.36 Alokasi Untuk Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (P4) BMI dan BSM Tahun 2003-2007
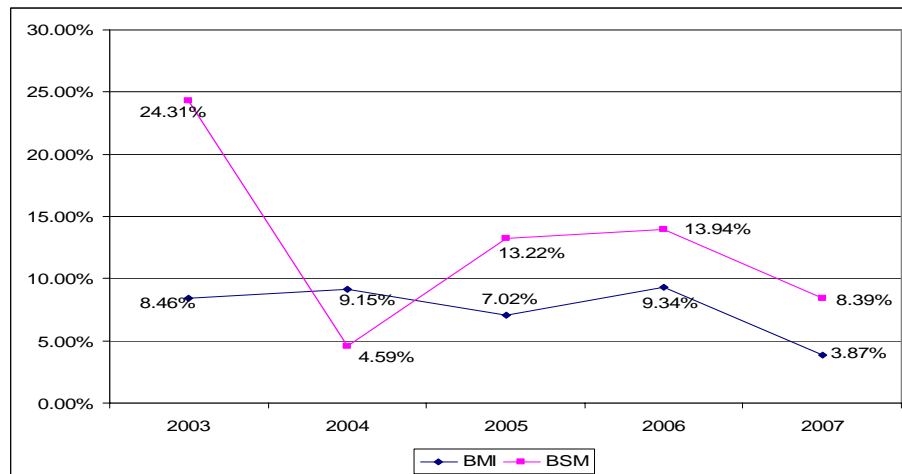
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

3.2.4.2 Alokasi Untuk Riset dan Pengembangan (R&D)

Rasio alokasi anggaran untuk penelitian dan pengembangan (R&D) dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur besarnya alokasi dana untuk program riset dan pengembangan BMI dan BSM. Besarnya alokasi sumber daya untuk program riset tentunya akan meningkatkan inovasi yang menghasilkan keunggulan secara berkelanjutan. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan komitmen untuk peningkatan riset dan pengembangannya yang semakin baik. Rasio R&D dihitung dengan membandingkan alokasi anggaran untuk riset yang tercermin dalam Biaya Penelitian dan Pengembangan serta Tenaga Ahli dengan Laba Setelah Pajak BMI dan BSM.

Dari nilai rata-rata rasio R&D pada periode tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk penelitian dan pengembangan (R&D) BSM lebih besar dibanding dengan BMI. Nilai rata-rata rasio R&D BSM pada periode tersebut adalah sebesar 1,96%, lebih tinggi 1,85% dibandingkan dengan nilai rata-rata rasio R&D BMI yang hanya 0,11%. Nilai rasio R&D BMI tertinggi adalah sebesar 0,27% terjadi pada tahun 2006 dan terendah sebesar 0% terjadi pada tahun 2003. Sedangkan nilai rasio R&D BSM terendah sebesar 0,80% terjadi pada tahun 2004 dan tertinggi sebesar 3,35% pada tahun 2003. Secara keseluruhan rasio R&D BSM pada setiap tahun lebih tinggi dari BMI.

Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa peringkat dari nilai rasio R&D BMI pada keseluruhan tahun dari 2003-2007 memperoleh peringkat 5. Sedangkan nilai rasio R&D BSM pada tahun 2003 mendapat peringkat 1, tahun 2004 peringkat 4, tahun 2005 dan 2006 memperoleh peringkat 2, sedangkan tahun 2007 turun menjadi peringkat 3. Hal ini mengikuti penentuan kriteria penilaian peringkat untuk rasio alokasi anggaran

untuk R&D adalah: Peringkat 1 = R&D > 3%; Peringkat 2 = 2% < R&D ≤ 3%; Peringkat 3 = 1% < R&D ≤ 2%; Peringkat 4 = 0,5% < R&D ≤ 1%; dan Peringkat 5 = R&D ≤ 0,5%.

Grafik 4.37 Alokasi Untuk Riset dan Pengembangan (R&D) BMI dan BSM Tahun 2003-2007
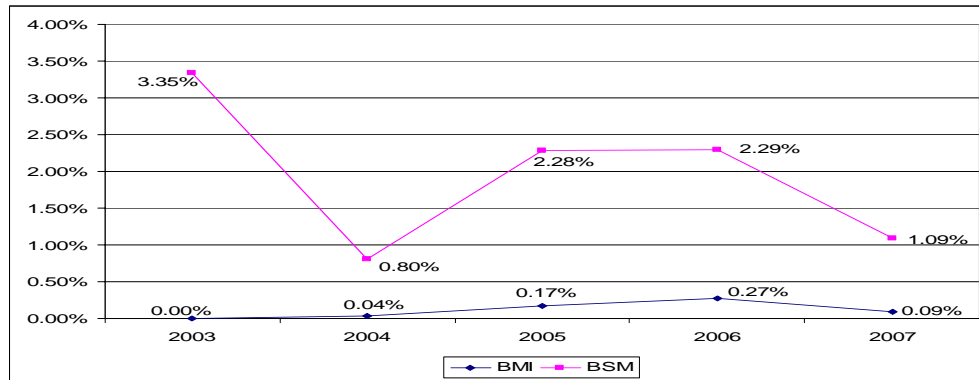
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

3.2.5 Kontribusi Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE)

Penilaian kuantitatif aspek Kontribusi Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE) BMI dan BSM dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap tiga rasio penting yang mencakup aspek Pemerataan Distribusi Aset Nasional (PDAN), Pemerataan Distribusi Investasi Nasional (PDIN), dan Kontribusi Pendapatan dari Luar Jawa (KPLJ).

3.2.5.1 Pemerataan Distribusi Aset Nasional (PDAN)

Melalui hasil penghitungan rasio pemerataan distribusi aset nasional (PDAN) ini dapat diketahui besarnya proporsi kekayaan atau aset BMI dan BSM yang berada diluar Jawa dibandingkan dengan aset nasionalnya. Melalui perhitungan ini dapat dievaluasi peran bank syariah tersebut dalam melakukan dekonsentrasi pembangunan ekonomi untuk Luar Jawa. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan disribusi pembangunan ekonomi yang diperankan bank syairah tersebut yang semakin baik. Rasio PDAN dihitung dengan membandingkan proporsi Aset BMI dan BSM di Luar Jawa dengan Total Aset Nasionalnya.

Data dari Grafik 4.38 menunjukkan bahwa proporsi aset BSM yang berada diluar Jawa dalam periode tahun 2003-2007, lebih tinggi dari BMI. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio PDAN rata-rata dalam periode tersebut dimana BMI mendapatkan nilai 20,89%, lebih rendah 2,45% dari nilai BSM yang mencapai 23,34%. Nilai rasio PDAN BMI tertinggi adalah sebesar 25,20% terjadi pada tahun 2007 dan terendah sebesar 15,54% terjadi pada tahun 2003. Sedangkan nilai rasio PDAN BSM terendah sebesar 10,49% terjadi pada tahun 2003 dan tertinggi sebesar 30,44% pada tahun 2007. Nilai rasio PDAN BMI lebih tinggi dari BSM haya terjadi pada tahun 2003.

Sebagaimana dijelaskan dalam metodologi, kriteria penilaian peringkat untuk rasio PDAN adalah: Peringkat 1 = PDAN > 40%; Peringkat 2 = 30% < PDAN ≤ 40%; Peringkat 3 = 20% < PDAN ≤ 30%; Peringkat 4 = 10% < PDAN ≤ 10%; dan Peringkat 5 = PDAN ≤ 10%. Maka dengan demikian rasio PDAN BMI pada tahun 2003 dan 2004 berada pada peringkat 4, sedangkan tahun 2005, 2006 dan 2007 meningkat sehingga

meraih peringkat 3. Sedangkan rasio PDAN BSM tahun 2003 dan 2004 mendapat peringkat 4, tahun 2005 peringkat 4, tahun 2006 dan 2007 mengalami peningkatan sehingga meraih peringkat 2.

Grafik 4.38 Pemerataan Distribusi Aset Nasional (PDAN) BMI dan BSM Tahun 2003-2007

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2003 2004 2005 2006 2007
BMI: 15.54% 19.35% 21.78% 22.60% 25.20%
BSM: 10.49% 19.92% 24.88% 30.97% 30.44%
BMI BSM
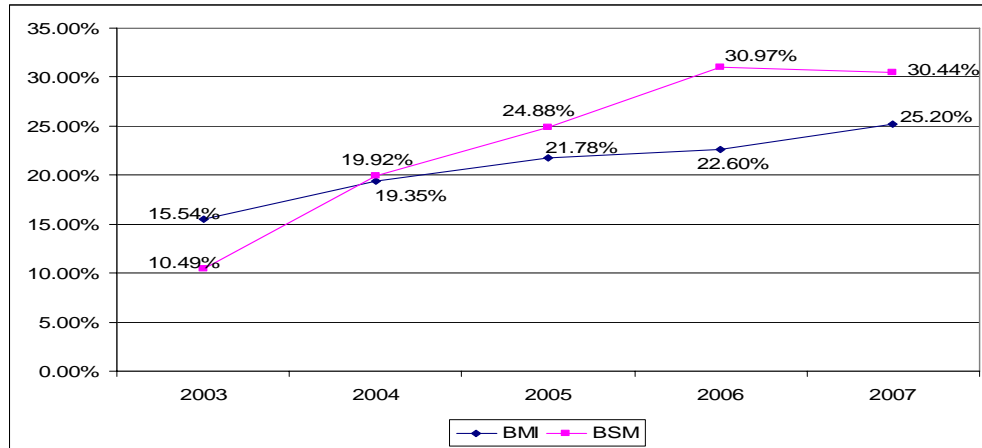
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

3.2.5.2 Pemerataan Distribusi Investasi Nasional (PDIN)

Rasio Pemerataan Distribusi Investasi Nasional (PDIN) dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur proporsi investasi nasabah BMI dan BSM yang berasal dari luar Jawa dibandingkan dengan total investasi nasabah nasionalnya. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan disribusi investasi nasabah secara nasional yang semakin baik. Rasio PDIN dihitung dengan membandingkan proporsi invetasi nasabah BMI dan BSM dari Luar Jawa dengan Total Investasi Nasabah Nasionalnya.

Grafik 4.39 Pemerataan Distribusi Investasi Nasional (PDIN) Tahun 2003-2007
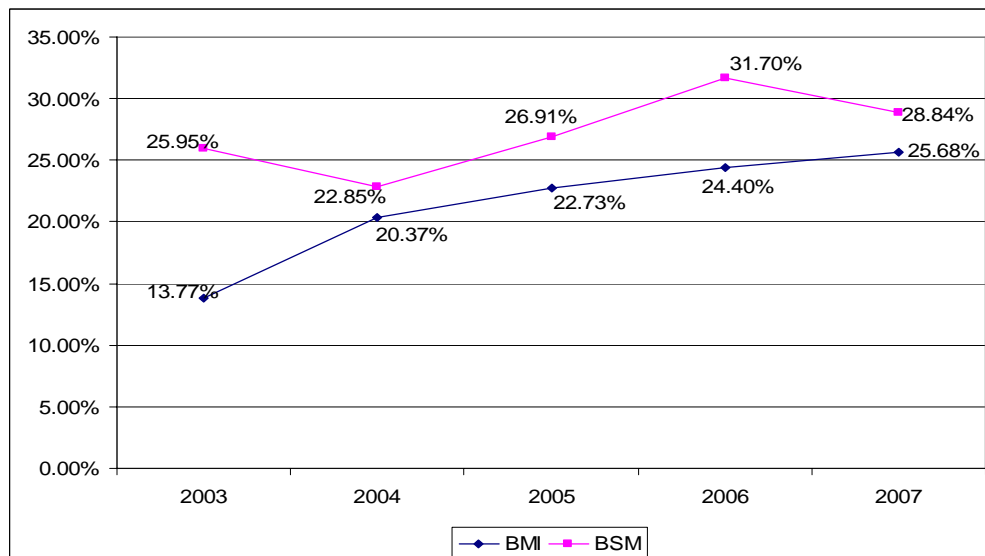
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

Dari nilai rata-rata rasio PDIN pada periode tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa proporsi investasi nasabah BMI dan BSM yang berasal dari luar Jawa BSM lebih besar dibanding dengan BMI. Nilai rata-rata rasio PDIN BSM pada periode tersebut adalah sebesar 27,25%, lebih tinggi 5,86% dibandingkan dengan nilai rata-rata rasio PDIN BMI yang bernilai 21,39%. Nilai rasio PDIN BMI tertinggi adalah sebesar 25,68% terjadi pada tahun 2007 dan terendah sebesar 13,77% terjadi pada tahun 2003. Sedangkan nilai rasio PDIN BSM terendah sebesar 22,85% terjadi pada tahun 2004 dan tertinggi sebesar 31,70% pada tahun 2006. Secara keseluruhan rasio PDIN BSM pada setiap tahun lebih tinggi dari BMI.

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa peringkat dari nilai rasio PDIN BMI pada tahun 2003 memperoleh peringkat 4, dan tahun berikutnya pada setiap tahun meraih peringkat 3. Sedangkan nilai rasio PDIN BSM pada tahun 2003, 2004 dan 2005 memperoleh peringkat 3, sedangkan tahun 2006 meningkat menjadi peringkat 2, tetapi tahun 2007 turun kembali menjadi peringkat 3. Hal ini mengikuti penentuan kriteria penilaian peringkat untuk rasio rasio PDIN adalah: Peringkat 1 = PDIN > 40%; Peringkat 2 = 30% < PDIN ≤ 40%; Peringkat 3 = 20% < PDIN ≤ 30%; Peringkat 4 = 10% < PDIN ≤ 10%; dan Peringkat 5 = PDIN ≤ 10%.

3.2.5.3 Kontribusi Pendapatan dari Luar Jawa (KPLJ)

Melalui hasil penghitungan rasio Rasio Kontribusi Pendapatan dari Luar Jawa (KPLJ) ini dapat diketahui proporsi pendapatan BMI dan BSM baik dari aktivitas pembiayaan maupun jasa yang berasal dari Luar Jawa dibandingkan dengan pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi proporsi pendapatan dari Luar Jawa mengindikasikan bahwa aktifitas pembiayaan, investasi dan layanan jasa yang semakin tinggi di Luar Jawa. Rasio KPLJ dihitung dengan membandingkan Pendapatan BMI dan BSM dari Luar Jawa dengan Total Pendapatan Nasional.

Grafik 4.40 Kontribusi Pendapatan dari Luar Jawa (KPLJ) Tahun 2003-2007
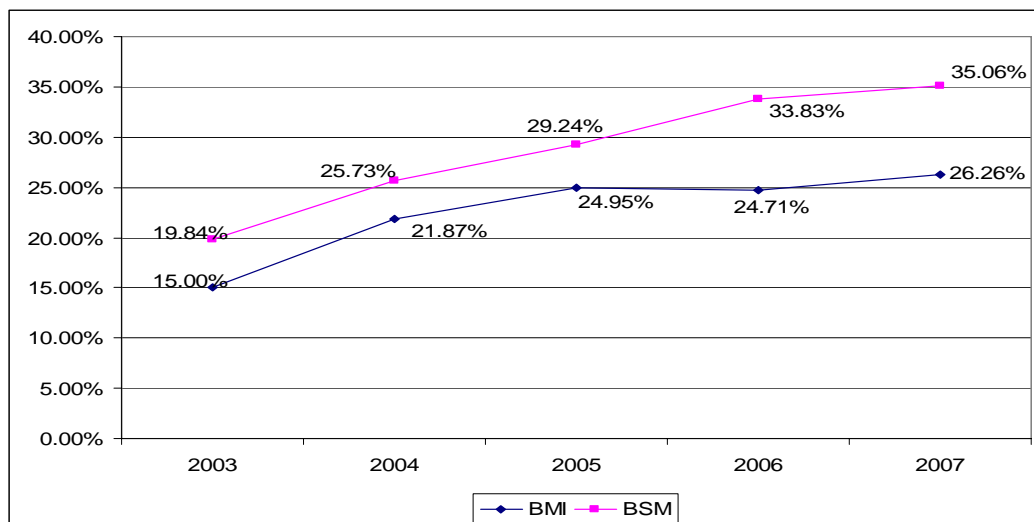
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

Dari nilai rata-rata rasio KPLJ pada periode tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa BSM memiliki proporsi pendapatan dari Luar Jawa baik dari aktivitas pembiayaan maupun jasa yang lebih besar. Nilai rata-rata rasio KPLJ BSM pada periode tersebut adalah sebesar 28,74%, lebih tinggi 6,918% dari nilai rata-rata rasio KPLJ BMI yang mencapai 22,56%. Nilai rasio KPLJ BMI tertinggi adalah sebesar 26,26% terjadi pada tahun 2007 dan terendah sebesar 15,00% terjadi pada tahun 2003. Sedangkan nilai rasio KPLJ BSM terendah sebesar 19,84% juga terjadi pada tahun 2003 dan tertinggi sebesar 35,06% pada tahun 2007. Secara keseluruhan, rasio KPLJ BSM pada setiap tahun lebih tinggi dari BMI.

Sebagaimana dijelaskan dalam metodologi, kriteria penilaian peringkat untuk rasio KPLJ adalah: Peringkat 1 = KPLJ > 40%; Peringkat 2 = 30% < KPLJ ≤ 40%; Peringkat 3 = 20% < KPLJ ≤ 30%; Peringkat 4 = 10% < KPLJ ≤ 10%; dan Peringkat 5 = KPLJ ≤ 10%. Maka dengan demikian rasio KPLJ BMI pada tahun 2003 berada pada peringkat 4, sedangkan tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007 meraih peringkat 3. Sedangkan rasio KPLJ BSM tahun 2003 mendapat peringkat 4, sedangkan tahun 2004 dan 2005 mendapat peringkat 3, dan tahun 2006 dan 2007 semakin membaik sehingga mendapat peringkat 2.

3.2.6.6 Tingkat Kinerja Sosial BMI dan BSM Kumulatif

Secara kumulatif, dalam periode tahun 2003-2007, tingkat kinerja sosial BSM lebih baik dari BMI. Secara rata-rata dalam periode tersebut tingkat kinerja sosial BSM mendapatkan nilai kredit setelah pembobotan kumulatif sebesar 64,07. Nilai tersebut lebih tinggi 8,17 dari nilai kinerja sosial BMI yang hanya sebesar 55,89. Dengan demikian, dari nilai rata-rata tersebut keduanya masih mendapat predikat Kurang Baik atau masih belum optimal berdasarkan kriteria dari penelitian ini. Tingkat kinerja sosial BSM tersebut merupakan nilai kumulatif kontribusi dari aspek KPE 10,80, KKM 13,00, KUS 13,60, PKSR 13,60, dan DPE bernilai 13,07. Sedangkan nilai kumulatif bagi BMI berasal dari sumber KPE 14,40, KKM 10,40, KUS 13,76, PKSR 6,40 dan DPE 10,93. Dari sini dapat dilihat bahwa BSM memiliki aspek KKM, PKSR dan DPE yang lebih baik dari BMI, masing-masing berpaut 2,60, 7,20 dan 2,13. Sedangkan nilai skor KPE dan KUS BMI lebih baik senilai 3,60 dan 0,16 dari KPE dan KUS BSM (Lihat Tabel 4.57 dan 4.58).

Dari Grafik 4.41 juga terlihat bahwa nilai kinerja sosial BMI hanya lebih baik dari BSM pada tahun 2004. Selebihnya semenjak tahun 2003, 2005 sampai dengan tahun 2007 kinerja sosial BSM lebih baik dibandingkan dengan BMI. Meski demikian trend kinerja sosial BMI terus meninggkat, dan selisih skornya juga semakin kecil. Dimana tahun 2003 nilainya berpaut sangat lebar 22,00, tetapi tahun 2004 BMI bisa lebih baik berpaut 4,20. Tahun 2005 BSM mendapat skor lebih tinggi dengan selisih menjadi 8,80, dan tahun 2006 selisih semakin tinggi menjadi 10,40. Tetapi tahun 2007 karena kinerja sosial BSM turun dan BMI meningkat maka selisihnya menyempit senilai 3,87.

Grafik 4.41 Komparasi Kinerja Sosial BMI dan BSM Tahun 2003-2007
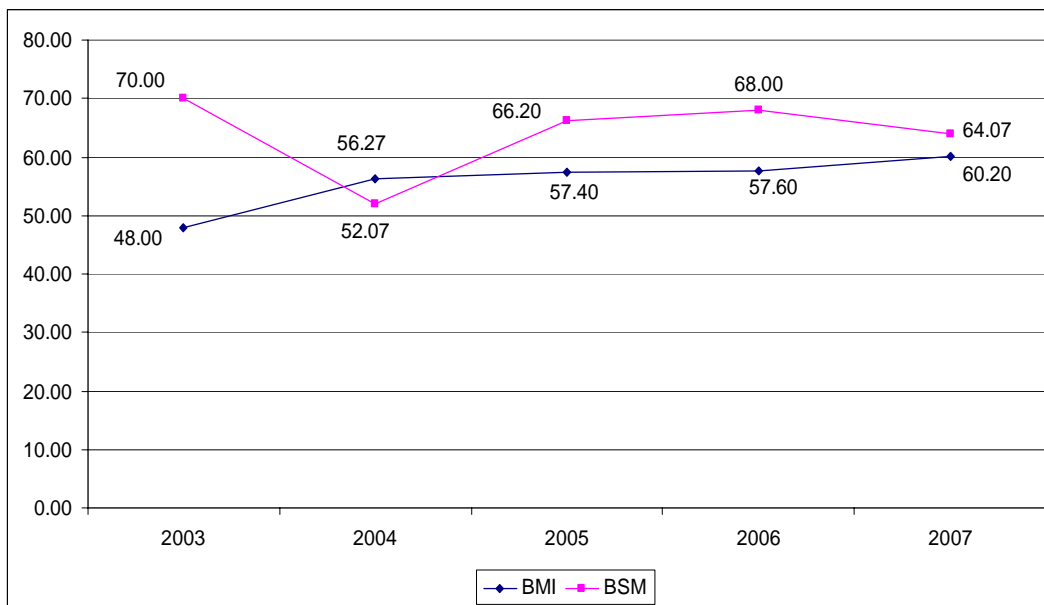
Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI & BSM, 2003-2007.

Tabel 4.57 Hasil Perhitungan Kinerja Sosial BMI Tahun 2003-2007

Komponen Kinerja Sosial		2003	2004	2005	2006	2007	Rata-Rata	Angka Kredit	Bobot	Nilai Bobot
1	**Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE)**									
a.	Intensitas pembiayaan profit sharing (MMR)	3	2	2	2	2	2.20	76	5.00%	3.80
b.	Intensitas fungsi agency (AR)	1	1	1	1	1	1.00	100	5.00%	5.00
c.	Kontribusi Pembangunan Jangka Panjang (KPJP)	3	4	4	5	3	3.80	44	5.00%	2.20
d.	Pendalaman fungsi agency (PFA)	2	2	2	3	4	2.60	68	5.00%	3.40
	Nilai Terbobot KPE								20.00%	14.40
2	**Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM)**									
a.	Kontribusi Pembiayaan Qard (QR)	5	5	5	5	4	4.80	24	5.00%	1.20
b.	Kinerja zakat (ZR)	5	4	3	2	1	3.00	60	5.00%	3.00
c.	Pelaksanaan fungsi sosial (RFS)	5	5	5	5	2	4.40	32	5.00%	1.60
d.	Pelaksanaan fungsi edukasi (CSR)	2	1	1	1	2	1.40	92	5.00%	4.60
	Nilai Terbobot KKM								20.00%	10.40
3	**Kontribusi Untuk Stakeholder (KUS)**									
a.	Kesejahteraan Sohibul Maal (KSM)	4	2	2	2	1	2.20	76	4.00%	3.04
b.	Kesejahteraan Mudharib (KM)	2	1	2	3	2	2.00	80	4.00%	3.20
c.	Kesejahteraan Investor DPK (KI)	2	2	2	1	2	1.80	84	4.00%	3.36
d.	Kesejahteraan Pemegang Wadiah (KPW)	3	5	4	5	4	4.20	36	4.00%	1.44
e.	Kontribusi Pajak untuk Pemerintah (KPP)	4	3	2	2	2	2.60	68	4.00%	2.72
	Nilai Terbobot KUS								20.00%	13.76
4	**Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR)**									
a.	Peningkatan Pendidikan & Pelatihan Pegawai (P4)	4	3	4	3	5	3.80	44	10.00%	4.40
b.	Riset dan Pengembangan (R&D)	5	5	5	5	5	5.00	20	10.00%	2.00
	Nilai Terbobot PKSR								20.00%	6.40
5	**Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE)**									
a.	Pemerataan Distribusi Aset Nasional (PDAN)	4	4	3	3	3	3.40	52	6.67%	3.47
b.	Pemerataan Distribusi Investasi Nasional (PDIN)	4	3	3	3	3	3.20	56	6.67%	3.73
c.	Kontribusi Pendapatan dari Luar Jawa (KPLJ)	4	3	3	3	3	3.20	56	6.67%	3.73
	Nilai Terbobot DPE								20.00%	10.93
	Nilai Kinerja Sosial									55.89

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BMI, 2003-2007.

Tabel 4.58 Hasil Perhitungan Kinerja Sosial BSM Tahun 2003-2007

Komponen Kinerja Sosial	2003	2004	2005	2006	2007	Rata-Rata	Angka Kredit	Bobot	Nilai Bobot
1 Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE)									
a. Intensitas pembiayaan profit sharing (MMR)	5	5	4	3	2	3.80	44	5.00%	2.20
b. Intensitas fungsi agency (AR)	2	2	2	3	2	2.20	76	5.00%	3.80
c. Kontribusi Pembangunan Jangka Panjang (KPJP)	4	3	3	5	5	4.00	40	5.00%	2.00
d. Pendalaman fungsi agency (PFA)	2	3	3	4	4	3.20	56	5.00%	2.80
Nilai Terbobot KPE								20.00%	10.80
2 Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM)									
a. Kontribusi Pembiayaan Qard (QR)	1	4	4	2	1	2.40	72	5.00%	3.60
b. Kinerja zakat (ZR)	5	5	3	2	5	4.00	40	5.00%	2.00
c. Pelaksanaan fungsi sosial (RFS)	1	3	3	1	1	1.80	84	5.00%	4.20
d. Pelaksanaan fungsi edukasi (CSR)	2	2	3	4	3	2.80	64	5.00%	3.20
Nilai Terbobot KKM								20.00%	13.00
3 Kontribusi Untuk Stakeholder (KUS)									
a. Kesejahteraan Sohibul Maal (KSM)	5	1	2	3	2	2.60	68	4.00%	2.72
b. Kesejahteraan Mudharib (KM)	2	3	2	2	1	2.00	80	4.00%	3.20
c. Kesejahteraan Investor DPK (KI)	2	3	2	2	3	2.40	72	4.00%	2.88
d. Kesejahteraan Pemegang Wadiah (KPW)	2	4	3	4	3	3.20	56	4.00%	2.24
e. Kontribusi Pajak untuk pemerintah (KPP)	4	1	2	4	3	2.80	64	4.00%	2.56
Nilai Terbobot KUS								20.00%	13.60
4 Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR)									
a. Peningkatan Pendidikan & Pelatihan Pegawai (P4)	1	5	2	2	4	2.80	64	10.00%	6.40
b. Riset dan Pengembangan (R&D)	1	4	2	2	3	2.40	72	10.00%	7.20
Nilai Terbobot PKSR								20.00%	13.60
5 Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE)									
a. Pemerataan Distribusi Aset Nasional (PDAN)	4	4	3	2	2	3.00	60	6.67%	4.00
b. Pemerataan Distribusi Investasi Nasional (PDIN)	3	3	3	2	3	2.80	64	6.67%	4.27
c. Kontribusi Pendapatan dari Luar Jawa (KPLJ)	2	3	3	2	2	2.40	72	6.67%	4.80
Nilai Terbobot DPE								20.00%	13.07
Nilai Kinerja Sosial									64.07

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan BSM, 2003-2007.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dalam periode tahun 2003-2007, kesehatan finansial BMI lebih baik dari BSM. Secara rata-rata dari periode tersebut tingkat kesehatan finansial BMI mendapatkan nilai kredit setelah pembobotan kumulatif sebesar 77,25. Nilai tersebut lebih tinggi 6,15 dari nilai kesehatan finansial BSM yang hanya sebesar 71,10. Tingkat kesehatan finansial BMI tersebut merupakan nilai kumulatif kontribusi dari aspek: Kualitas Aset 54,60; Rentabilitas 10,65; dan Likuiditas 12,00. Sedangkan nilai kumulatif bagi BSM berasal dari sumber Kualitas Aset sebesar 50,40; Rentabilitas 8,40; dan Likuiditas 12,30. Dari sini dapat dilihat bahwa, BMI memiliki aspek Kualitas Aset dan Rentabilitas yang lebih baik dari BSM, sedangkan nilai skor Likuiditas BSM lebih baik dari likuiditas BMI. Berdasarkan masing-masing tahun, nilai kesehatan finansial BSM tahun 2003 lebih baik bila dibandingkan dengan BMI. Tetapi, selebihnya semenjak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, kesehatan finansial BMI lebih baik dibandingkan dengan BSM.

Sedangkan untuk tingkat kinerja sosial, dalam periode tahun 2003-2007 kinerja BSM lebih baik dari BMI. Secara rata-rata dalam periode tersebut tingkat kinerja sosial BSM mendapatkan nilai kredit setelah pembobotan kumulatif sebesar 64,07. Nilai tersebut lebih tinggi 8,17 dari nilai kinerja sosial BMI yang hanya sebesar 55,89. Tingkat kinerja sosial BSM tersebut merupakan nilai kumulatif kontribusi dari aspek: Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE) sebesar 10,80; Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM) sebesar 13,00; Kontribusi Untuk Stakeholder (KUS) sebesar 13,60; Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR) sebesar 13,60; dan Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE) bernilai 13,07. Sedangkan nilai kumulatif bagi BMI berasal dari sumber: KPE sebesar 14,40; KKM sebesar 10,40; KUS sebesar 13,76; PKSR sebesar 6,40; serta DPE senilai 10,93. Dari sini dapat dilihat bahwa BSM memiliki aspek KKM, PKSR dan DPE yang lebih baik dari BMI, sedangkan nilai skor KPE dan KUS BMI lebih baik dari BSM. Berdasarkan masing-masing tahun, penelitian ini juga menemukan bahwa nilai kinerja sosial BMI lebih baik dari BSM hanya terjadi pada tahun 2004. Selebihnya semenjak tahun 2003, 2005 sampai dengan tahun 2007 kinerja sosial BSM lebih baik dibandingkan dengan BMI. Meski demikian *trend* kinerja sosial BMI terus meningkat, dan selisih skornya dengan kinerja sosial BSM juga semakin kecil.

Dari penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut: *Pertama*, untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja bisnis, baik bagi BMI maupun BSM, aspek penting yang dominan dan perlu diperhatikan adalah kualitas aktiva produktif (KAP) dan pembiayaan *non-performing* (NPF). Terlebih dalam kondisi makro ekonomi yang berat yang akan dihadapi bank syariah tahun 2009 –hal ini mirip seperti tahun 2006 pasca pemerintah menaikkan harga BBM yang sangat tinggi diakhir tahun 2005-, maka KAP dan NPF bank syariah potensial mengalami pukulan yang berat. Menjaga dan memperbaiki KAP dan NPF menjadi mutlak, karena dari sinilah kondisi pendapatan utama bank akan terbentuk, yang berikutnya akan menentukan pada profitabilitasnya.

Kedua, secara umum, kedua bank syariah tersebut perlu meningkatkan kinerja sosialnya. Kontribusi sosial BMI dan BSM dalam pembangunan jangka panjang (KPP) dan juga peran untuk mendorong redistribusi pembangunan ekonomi (DPE) nasional

perlu diperhatikan. Hal ini penting mengingat kehadiran bank syariah diharapkan akan mendorong realokasi dan redistribusi pembangunan ekonomi yang selama ini terkonsentrasi kepada kelompok atau wilayah tertentu baik melalui sebaran aset, investasi maupun aktivitasnya. Selain itu yang juga penting, aspek Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR) serta aspek Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM) baik dalam bentuk Pembiayaan *Qardh*, penunaian Zakat, serta kontribusi edukasi publik dari BMI dan BSM tetap perlu ditingkatkan.

Dan *ketiga*, dalam penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan, baik akibat keterbatasan waktu, sumber data dan juga berbagai keterbatasan dari peneliti. Untuk itu diperlukan penelitian lanjutan dari peneliti-peneliti berikutnya, terutama untuk mengelaborasi kinerja sosial bagi bank syariah tersebut. Penelitian tersebut diantaranya dapat memperdalam hasil penelitian ini baik dengan menguji komponen aspek yang dinilai dalam kinerja sosial bank syariah, penentuan nilai dan juga model pembobotannya. Dengan demikian diharapkan kedepan akan terbentuk satu model standar untuk mengukur kinerja sosial bank syariah yang solid, valid dan reliabel yang kemudian dapat ditetapkan dan digunakan oleh pihak regulator, dalam hal ini Bank Indonesia serta bagi industri perbankan syariah secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

Ahmad, Ausaf, 2000. *Instrument of Regulation and Control of Islamic Banks by The Central Banks*. Jeddah: IRTI-IDB.

Ahmed, Ziauddin, Iqbal, Munawar and Khan, Fahim (Eds), 1996. *Money and Banking In Islam.* International Center for Research In Islamic Economics, King Abdul Aziz University Jeddah and Institute of Policy Studies Islamabad-Pakistan.

Ahmed, Ziauddin, 1994. *Islamic Banking: State of The Art*. Jeddah: IRTI-IDB.

Ali, Salman Syed & Ahmad, Ausaf, 2007. *Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues*. Jeddah: IRTI-IDB.

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999. *Bank Syariah; Wacana Ulama & Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia & Tazkia Institute.

Arsil, Fadhil, 2007. "Analisis Kinerja Bank Syariah Ditinjau dari Pengaruh Eksternal (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2001 – Juni 2003)", Jurnal EKSIS-PSTTI UI, Vol. 3. No. 1, Januari-Maret 2007. hal. 35-49.

Ascarya & Yumanita, Diana, 2005. "Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia". Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juni.

Bank Indonesia, 2007. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9 Tahun 2007 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bank Indonesia, 2007. PBI No. 9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bank Indonesia, 2007. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/12/DPNP perihal pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Bank Indonesia, 2006. PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Bank Indonesia, 2006. PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Bank Indonesia, 2005. PBI No. 7 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syarah.

Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2004-2008*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.

Bank Indonesia, 2007. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Akhir Tahun 2003-2007*. Jakarata: PT BMI.

Bank Syariah Mandiri, *Laporan Akhir Tahun 2003-2007*. Jakarata: PT BSM.

Capra, M. Umer & Ahmed, Habib, 2002. *Corporate Governance in Islamic Financial Institution.* Jedah: IRTI-IDB.

Capra, M. Umer, 2002. *Pengharaman Bunga Bank; Rasionalkah ?; Analisis Syar'i dan Ekonomi dibalik Pengharaman Bunga Bank.* Jakarta: SEBI.

Capra, M. Umer, 2001. *What is Islamic Economics?.* Jedah: IRTI-IDB.

Capra, M. Umer, 2001. *The Future of Economics.* Edisi terjemah. Jakarta: SEBI.

Capra, M. Umer & Khan, Tariqullah, 2000. *Regulation and Supervision of Islamic Banks.* Jedah: IRTI-IDB.

Capra, M. Umer, 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: DSN MUI dan Bank Indonesia.

Fatima & Pramono, Sigit, 2007. "Governance Committee and Governance Audit Model in Islamic Banks: How will it Resolve the Problem of Information Asymmetry?". IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance, April 20-23.

Grais, Wafik & Pellegrini, Matteo, 2006. "Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services". World Bank Policy Research Working Paper 4054, November.

Hameed, Shahul, et. al., 2004. "Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's". *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahran, Saud Arabia.

Hidayat, Sutan Emir, 2008. **"**Tujuan dan Arah Keuangan Islam", Republika 4 Agustus.

Hussein, Khaled A, 2004. *Banking Efficiency in Bahrain: Islamic vs Conventional Banks*. Jeddah: IRTI-IDB.

Ilyas, Nasirwan, 2004. "Seputar Isu Corporate Governance dalam Bank Syariah". Paper dipresentasikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam *Good Corporate Governance in Islamic Banking* , STIE SEBI, Jakarta.

Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abas, 2007. *An introduction to Islamic finance, Theory and Practice*. Singapore: John and Wiley & Sons.

Iqbal, Zamir, 1997. "Islamic Financial System", World Bank: Finance & Development, June.

Kamel, Saleh, 2000. *Development of Islamic Banking Activity, Problems and Prospects*. Jeddah: IRTI-IDB.

Karim, Adiwarman, 2007. *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Khan, Tariqullah and Ahmed, Habib, 2001. *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry.* Jeddah: IRTI-IDB.

Lewis, Mervin K. & Algaoud, Latifa M., 2007. *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek.* Edisi terjemah. Jakarta: Serambi.

Mahfudz, Ahmad Afandi, 2006. "Performance Evaluation of Islamic Commercial Banks In Indonesia After The Financial Crisis", *Tazkia Islamic Finance & Business Review* Vol. 1. No. 2 Agustus-Desember, hal. 93-107.

Obaidullah, Mohammed, 2005. *Islamic Financial Services*. Jeddah: Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.

Prawira, Hendra, 2007. "Perbandingan Kinerja PT. Bank Jabar Syariah Sebelum dan Sesudah Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank", Jurnal EKSIS-PSTTI UI, Vol. 3. No. 1, Januari-Maret 2007. hal. 51-65.

Rindawati, Erna, 2007. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*. Skripsi S-1 UII Yogyakarta.

Riyadi, Selamet, 2006. *Banking Assets and Liability Management*, Edisi Ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.

Rosyadi, Ibnu Fallah, 2007. "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah dengan Bank Konvensional Berdasarkan Rasio Keuangan. Studi Kasus: BMI dan 7 (tujuh) Bank Umum Konvensional", Jurnal EKSIS-PSTTI UI, Vol. 3. No. 1, Januari-Maret 2007. hal. 19-33.

Saeed, Abdullah, 2003. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Edisi Terj., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Samad, Abdus and Hasan, M. Kabir, 2000. "The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Studi", International Journal of Islamic Financial Services, Vol.1. No. 3.

Sekaran, Uma, 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Buku 1& 2. Jakarta: Salemba Empat.

Siddiqi, M. Nejatullah, 2004. *Riba, Bank Interest and the Rational of its Prohibition*. Jeddah: IRTI-IDB.

Siddiqi, M. Nejatullah, 1983. *Banking Without Interest.* Leicester UK: The Islamic Foundation.

Suharto, dkk., 2001. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah.* Jakarta: Djambatan.

Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian* Kuantitatif *dan Kualitatif dan R & D.* Cetakan Ketiga. Jakarta: CV. ALFABETA.

Umar, Husein, 2004. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: Rajawali Press.